



BERSAMA MEMBANGUN INDONESIA



DAFTAR ISI

iii

Ikhtisar Data Keuangan Penting

05

Laporan Dewan Pengawas Syariah

iv

Peristiwa Penting 2018

07

Profil Dewan Pengawas Syariah

01

Laporan Dewan Komisaris

09

Laporan Direksi

03

Profil Dewan Komisaris

11

Profil Direksi



13

Profil Perseroan

58

Perkara Penting Yang Dihadapi

19

Pembahasan Dan Analisis Manajemen

59

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

23

Manajemen Resiko

60

Pernyataan Dewan Komisaris Dan Direksi

31

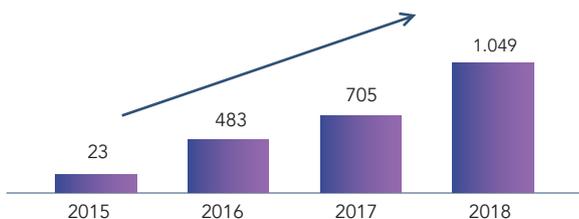
Tata Kelola Perusahaan



Ikhtisar Data Keuangan Penting

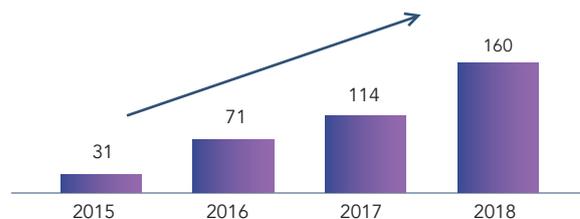
Total Booking

dalam Milyar Rupiah



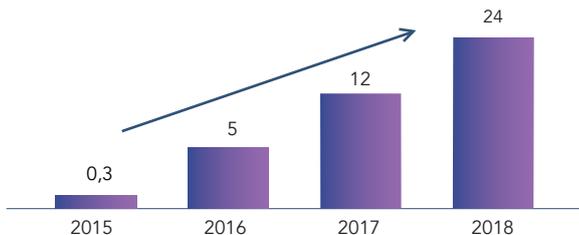
Revenue / Pendapatan

dalam Milyar Rupiah



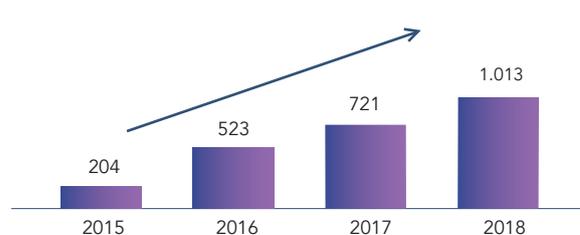
Net Profit After Tax / Laba Bersih

dalam Milyar Rupiah



Asset Managed / Aset Dikelola

dalam Milyar Rupiah



Key Ratios

ROA	ROE	Non Performing Loan
3,07 %	10,31 %	0,45 %



Peristiwa Penting 2018



MARET

- *MoU Signing Ceremony* dengan Gaya Makmur Group.
- *Signing* penambahan plafon kredit dari Bank Victoria
- *MoU Signing Ceremony* dengan PT Beyond Medical Indonesia



APRIL

- *Bank Gathering*
- *MoU Signing Ceremony* dengan PT Hospimedik Indonesia



JUNI

- *Signing* penambahan plafon kredit dari BTPN



AGUSTUS

- *Mid Year Raker*
- *MoU Signing Ceremony* dengan PT Mediva



OKTOBER

- *Signing* penambahan plafon kredit modal kerja dari Bank BJB
- *Hospital Expo 2018*



DESEMBER

- HUT MNC Leasing ke-4
- *Signing* penambahan plafon kredit dari BTPN
- *Signing* penambahan plafon kredit dari Bank Capital
- *Signing* penambahan plafon kredit dari Bank Sahabat Sampoerna



LAPORAN DEWAN KOMISARIS





Laporan Dewan Komisaris



Wito Mailoa
Komisaris Utama

“Di tahun 2018 ini Perseroan berhasil menjaga pertumbuhan yang sangat baik dengan membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 105% menjadi Rp. 24,22 miliar”

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Perseroan dapat menutup tahun 2018 dengan sangat baik. Dalam laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan laporan mengenai penilaian kinerja Direksi, pengawasan terhadap implementasi strategi perusahaan, pandangan atas prospek usaha, pandangan atas implementasi tata kelola perusahaan, penilaian atas komite penunjang Dewan Komisaris dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2018, kondisi ekonomi global masih diliputi ketidakpastian yang terutama disebabkan oleh normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) yang berdampak pada pengetatan likuiditas. Kondisi ekonomi global menjadi tidak menentu karena terjadi perang dagang AS dan China. Meski demikian ekonomi Indonesia di tahun 2018 masih dapat bertumbuh dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17%. Pertumbuhan ini didukung dari sektor konsumsi, investasi, hingga belanja pemerintah. Pertumbuhan tersebut tentunya juga membawa dampak positif bagi industri pembiayaan yang juga turut mengalami pertumbuhan.

Di tahun 2018 ini Perseroan berhasil menjaga pertumbuhan yang sangat baik dengan membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 105% menjadi Rp.24,22 miliar. Pertumbuhan pembiayaan yang diikuti dengan pengelolaan kualitas piutang yang baik dan struktur pendanaan yang kuat membuat Perseroan berhasil membukukan tingkat keuntungan yang maksimal dengan tingkat kredit macet yang sangat rendah.

Dalam melakukan pengawasan, selama tahun 2018 Dewan Komisaris secara aktif memanfaatkan fungsi komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk melakukan review secara periodik terhadap rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja, kinerja keuangan, laporan-laporan audit internal, eksternal auditor dan/atau regulator serta laporan-laporan lainnya yang tersedia. Hasil review tersebut dilaporkan dan dibahas kembali dalam rapat internal Dewan Komisaris.

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan secara aktif dan berkala atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik demi menjamin tercapainya kepentingan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan Perseroan. Untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris sudah berjalan optimal, Dewan Komisaris telah dibantu oleh Komite Audit, Komite Tata Kelola dan Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris menilai bahwa ke-3 komite tersebut telah memberikan dukungan pro-aktif dan efektif kepada Dewan Komisaris sehingga mempermudah tugas Dewan Komisaris di dalam melakukan tugas pengawasannya. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris memandang bahwa struktur tata kelola perusahaan yang telah dikembangkan di lingkungan Perseroan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dinilai dapat mendukung pertumbuhan Perseroan yang sehat secara berkesinambungan.

Susunan Dewan Komisaris Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 Juni 2018, dengan pengunduran diri Bapak Totok Sugiharto dari jabatannya selaku Komisaris. Susunan Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan kembali berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 21 September 2018, dengan diangkatnya Bapak Wito Mailoa sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan bagi perkembangan Perseroan. Selanjutnya saya juga memberikan apresiasi kepada Direksi, segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Semoga prestasi yang telah diraih dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang.

Atas Nama Dewan Komisaris,

Wito Mailoa
Komisaris Utama



Profil Dewan Komisaris



■ **Wito Mailoa**
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Manado pada tahun 1969. Saat ini berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 September 2018.

Beliau menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 1991 dengan gelar *Bachelor of Science in Management Information System* dari San Diego State University, Amerika Serikat. Selanjutnya gelar *Master of Business Administration in Finance* dari California State Polytechnic University Pomona, Amerika Serikat, pada tahun 1993.

Bergabung dengan MNC Group melalui PT MNC Securities sebagai Direktur Utama pada Oktober 2009 sampai tanggal 21 Januari 2013. Beliau memulai karir pada tahun 1995 di PT Harumdana Securities dan pada tahun 1998 di PT Sigma Batara Securities. Kemudian pada tahun 1999 beliau menjadi Associate Director di PT Indoverse Securities. Antara tahun 2001-2008 beliau menjabat sebagai Direktur di PT CIMB-GK Securities Indonesia, antara tahun 2008-2009 menjabat sebagai Direktur di PT OSK Nusadana Securities Indonesia, menjabat sebagai Direktur Independen PT MNC Kapital Indonesia Tbk antara tahun 2012-2016, dan menjabat sebagai Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk antara tahun 2016-2018, dan sejak tanggal 31 Mei 2018 diangkat menjadi Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk.



■ **Erdie Suriaherdadi Manan**
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Jember (Jawa Timur), pada tahun 1954. Beliau berhasil menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) *Electrical Engineering* di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1978 dan program studi *Magister Business Administration* di IPMI Business School Jakarta pada tahun 1988.

Berpengalaman lebih dari 36 tahun, Beliau mengawali karirnya pada tahun 1979 di perusahaan yang bergerak dibidang *Oil and Gas Services* yaitu *Schlumberger Overseas SA*, dengan penugasan di Indonesia, Australia dan *Middle East*, hingga menjabat sebagai *General Field Engineer* pada tahun 1988 di PT Elnusa Schlumberger Wireline. Pada tahun 1989, Beliau memulai karirnya pertama kali di dunia leasing di PT ORIX Indonesia Finance sebagai Staff Marketing. Selama berkarir di ORIX, Beliau menjalani berbagai penugasan dibidang *Credit Analyst, Credit Admin, Internal Audit, IT, Corporate Planning, Tax & Accounting, HR, Business Development*, dan jabatan terakhir beliau adalah sebagai *Vice Director* pada tahun 2009. Pada periode 2000 - 2002, Beliau sempat bergabung dengan ABN Amro dan ditugaskan sebagai *President Director* ABN Amro Indonesia Finance, sebelum kembali bergabung dengan ORIX Indonesia Finance. Pada periode 2006 - 2009, beliau juga ditugaskan sebagai Komisaris di Bank Akita. Pada tahun 2011 hingga awal 2016, Beliau menjadi *Technical Advisor* di ORIX Indonesia Finance.

Dan di tahun 2016, Beliau bergabung dengan keluarga besar MNC Group, di unit bisnis MNC Leasing, yang bergerak di jasa Multi Finance dan dipercaya sebagai Komisaris Independen.



LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH





Laporan Dewan Pengawas Syariah



Muhamad Nadratuzzaman Hosen
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan hidayah Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dalam laporan ini, saya mewakili Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengucapkan selamat kepada manajemen dan seluruh karyawan Perseroan atas pencapaian dan kinerja yang sangat positif, dimana Perseroan berhasil mencatat volume pembiayaan syariah yang bertumbuh secara signifikan sebesar 224% dari Rp. 5,8 miliar di tahun 2017 menjadi Rp. 18,8 miliar di tahun 2018.

Perseroan juga mampu menjaga kualitas pembiayaan syariah yang terlihat dari rasio NPF pembiayaan syariah sebesar 0%. Pertumbuhan Perseroan di tahun 2018 ini tentunya tidak terlepas dari usaha, kerja keras dan kerja sama dari seluruh pihak di Perseroan dan juga ditambah dengan adanya dukungan serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan khususnya konsumen terhadap kinerja Perseroan. Amanah yang diberikan masyarakat dan konsumen sebaiknya terus dijaga dan dipertahankan dengan baik.

DPS secara rutin akan terus menyampaikan usulan, pendapat, arahan, dan opini serta memberikan persetujuan untuk hal-hal yang menjadi bahan pembicaraan. Selanjutnya diharapkan agar ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun Fatwa-Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, secara konsisten tetap terjaga.



DPS berharap agar Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya secara optimal dengan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Selain itu, sinergi yang telah dibangun selama ini dapat dijaga dan terus ditingkatkan. Komitmen yang sudah ada harus terus dijaga.

Pada akhirnya kami berharap dan berdoa, semoga usaha untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan yang lebih baik serta berkualitas, akan selalu mendapat bimbingan serta ridho dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah,

Muhamad Nadratuzzaman Hosen
Ketua Dewan Pengawas Syariah



Profil Dewan Pengawas Syariah



■ **Muhamad Nadratuzzaman Hosen**
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1961. Beliau memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Peternakan IPB pada tahun 1984 dan dilanjutkan dengan gelar pasca sarjana di bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari IPB pada tahun 1990. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan *Post-graduated Advanced Studies in Human Ecology*, VUB-Brussels, pada tahun 1994 dan *Master of Economics at University of New England, Australia*, pada tahun 1996. Terakhir beliau memperoleh gelar *Doctor of Philosophy in Economics* dari *University of New England, Australia* pada tahun 2001.

Di bawah ini merupakan daftar riwayat pekerjaan dari Ketua Dewan Pengawas Syariah:

Riwayat Pekerjaan di Pemerintahan:

1. Staff Bina Program, Dinas Peternakan Bengkulu.1984
2. Kepala Seksi Perumusan dan Pengendalian Program, Dinas Peternakan Bengkulu 1985-1987 (eselon IV/a)
3. Tugas Belajar dengan Biaya Sendiri 1987-2000
4. Kepala Bidang Teknologi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Riset dan Teknologi, 2001-2003 (eselon III/a)
5. Dosen Ekonomi Islam di UIN Jakarta dengan pangkat Lektor (IV/a), 2002
6. Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam di UIN, 2011-2013

Riwayat Pekerjaan di Luar Pemerintahan :

1. Peneliti Senior SMERU Research Institute, 2003
2. Staff Ahli Bidang BUMN di Komisi V, DPR RI periode 2001-2004
3. Vice President MACON International Consultant, 2004
4. Direktur Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), 2005-2009
5. Dekan Fakultas Ekonomi YARSI, 2009-2011
6. Direktur Executive Islamic Banking and Finance (IBFI) Trisakti, 2011-2013.
7. Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, 2014 -2017

Saat ini selain menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Treasure Fund Investama dan PT GAP Capital.



■ **Dr. Jaenal Effendi, S.Ag. MA**
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974. Beliau memperoleh gelar sarjana dari Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan gelar pasca sarjana di bidang Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2005. Terakhir beliau memperoleh gelar Doktor dalam bidang Keuangan dan Perbankan Islam dari *University of Georg August – Goettingen, Germany* pada tahun 2013.

Saat ini selain menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan beliau juga bekerja sebagai:

1. Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
2. Dosen Sarjana dan Pasca Sarjana Ekonomi Islam IPB,
3. Anggota BPH Pokja Perbankan - Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI



LAPORAN DIREKSI





Laporan Direksi



Paulus Cholot Janala
Direktur Utama

“Perseroan kembali berhasil membukukan kinerja yang jauh lebih baik di tahun 2018 dan mencatat pertumbuhan positif selama empat tahun berturut-turut”

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga Perseroan kembali berhasil membukukan kinerja yang jauh lebih baik di tahun 2018 dan mencatat pertumbuhan positif selama empat tahun berturut-turut.

Perseroan berhasil membukukan rekor baru pencapaian laba bersih sebesar Rp. 24,22 miliar, meningkat 105% dari tahun sebelumnya dan tingkat pencapaian target 2018 diangka 135%. Pencapaian kinerja terbaik Perseroan dapat diraih berkat sinergi dan kerjasama yang baik di internal organisasi serta kerja sama strategis dengan mitra usaha Perseroan.

Di tahun 2018 ini Perseroan menyalurkan pembiayaan senilai Rp. 1,049 miliar, meningkat 48,7% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan tersebut meningkatkan total piutang yang dikelola mencapai Rp. 835,9 miliar.

Dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, Perseroan berpegang teguh pada prinsip keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan kualitas piutang. Penerapan manajemen risiko menjadi bagian terintegrasi dari strategi pertumbuhan Perseroan. Secara konsisten Perseroan menjalankan proses akuisisi yang *prudent* dan melakukan proses pengelolaan piutang secara profesional dalam kerangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

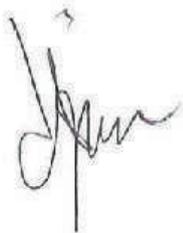
Menghadapi tantangan dan kesempatan di tahun 2019, Perseroan telah menyusun strategi pertumbuhan terkait dengan rencana pengembangan bisnis yang berkesinambungan. Target Perseroan di tahun 2019 – 2025 adalah mencapai aset Rp. 5 triliun. Untuk mencapai hal tersebut Perseroan akan fokus untuk memperbaiki seluruh proses bisnis yang dilakukan dengan tetap menitikberatkan kepada usaha untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ageng Purwanto yang telah mengakhiri pengabdian sebagai Direktur Utama dan memantapkan dasar yang kuat untuk pertumbuhan Perseroan serta menjadi bagian penting dari keberhasilan Perseroan.

Sepanjang tahun 2018, Perseroan mendapatkan 2 penghargaan yaitu sebagai perusahaan *multifinance* dengan predikat sangat bagus pada kategori perusahaan pembiayaan dengan aset Rp. 500 miliar - Rp. 1 triliun yang diselenggarakan oleh Infobank pada 6 September 2018 dan perusahaan pembiayaan dengan performa *excellent* pada kategori perusahaan pembiayaan dengan aset Rp. 500 miliar - Rp. 1 triliun yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada 26 Oktober 2018.

Terakhir, mewakili manajemen, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham Perseroan, jajaran manajemen dan seluruh karyawan atas dukungan, dedikasi dan kerjasama dalam meningkatkan nilai Perseroan sehingga dapat mencapai kinerja terbaik di tahun 2018. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pelanggan, rekanan bisnis dan institusi keuangan yang senantiasa mendukung jalannya usaha Perseroan. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat semakin ditingkatkan di masa mendatang.

Atas Nama Direksi,



Paulus Cholot Janala
Direktur Utama

Profil Direksi



■ **Paulus Cholot Janala**
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970, Meraih gelar *Landscape Architecture* dari IPB pada tahun 1994. Pada tahun 1993-1994 beliau berkarier di PT Citra Cipta Landscape sebagai *Site Manager*. Selanjutnya pada tahun 1995-2000 beliau berkarier di PT Bank Bali sebagai *Area Manager*. Pada tahun 2001-2006 beliau berkarier di PT Indomobil Finance sebagai *General Manager*, dan pada tahun 2006-2007 beliau menjabat sebagai *Regional Manager* di PT DBS. Selanjutnya di tahun 2007-2014 beliau menjabat sebagai *Senior Vice President* di PT Bank OCBC NISP, dan pada tahun 2014-2015 beliau berkarier di PT Bank CIMB Niaga sebagai *First Vice President*. Selanjutnya pada tahun 2016-2017 beliau berkarier sebagai *Corporate Executive Officer* di PT HVMI. Sejak April 2017 beliau bergabung dengan PT MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Direktur dan sejak tanggal 21 September 2018 diangkat menjadi Direktur Utama PT MNC Guna Usaha Indonesia.



■ **Yusnandi Liauw**
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969, pada tahun 1995 lulus Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen Perbankan. Selama tahun 1995 - 1999 berkarir di PT. Bank Central Dagang (BCD), yang diawali dengan mengikuti *Management Development Program (MDP)*, dengan posisi terakhir sebagai *Senior Credit Officer*. Pada tahun 1999 - 2000 sebagai *Loan Workout Officer* di BPPN, kemudian berkarir di Bank Mayapada International Tbk periode Feb 2000 - Juni 2005, dan sejak Juni 2005 bergabung dengan PT. MNC Finance, diawali sebagai *Area Marketing Manager* Jabodetabek. Selama berkarir di PT. MNC Finance, sudah pernah menjabat diberbagai posisi baik dalam direktorat Operasional, Marketing, Credit dan Treasury, dengan posisi terakhir sebagai *General Manager Fund Raising, Mortgage & Credit Corporate Analyst*. Sejak Oktober 2014 sampai dengan saat ini, bergabung dengan PT. MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) sebagai Direktur.



■ **Meita Liliarsari**
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1973, Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STIE YAI, Jakarta pada tahun 1996 dan meraih gelar *Master of Management* pada tahun 2016 di Universitas Tarumanagara.

Memiliki pengalaman di bidang multi finance selama 22 tahun, selama karirnya beliau menjalani penugasan dibidang finance & accounting dan operation. Beliau berkarir di PT. Adira Dinamika Multi Finance selama 5 tahun dan melanjutkan karir pada tahun 2000-2003 sebagai *Assistant Manager Finance & Accounting* di PT. Lescacho Logistic Indonesia, kemudian berkarir di PT. Itochu Auto Multi Finance periode 2003-2005. Sebelum bergabung di PT. Arta Prima Properti pada periode 2015-2016 sebagai *Chief Financial Officer*, beliau juga pernah berkarir di PT Radana Bhaskara Finance Tbk (d/h PT HD Finance Tbk.) dari tahun 2005-2015, dengan jabatan terakhir sebagai *Deputy Director*. Sejak September 2016 sampai dengan saat ini, bergabung dengan PT. MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) sebagai Direktur.



PROFIL PERSEROAN





Profil Perseroan

PT MNC GUNA USAHA INDONESIA



KANTOR PUSAT

Alamat : MNC Tower Lantai 23, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340
No. Telepon : (021) 3910 993
No. Fax : (021) 3911 093
Website : www.mncleasing.com



KANTOR PERWAKILAN

- 1. Medan**
MNC Financial Service Lantai 2
Jl. Kapt Maulana Lubis No 12
Medan
Telp. (061) 69100600
- 2. Pekanbaru**
MNC Financial Service Lantai 3
Jl. Arifin Ahmad No 10
Komp Arifin Ahmad Central Ruko H-K
Pekanbaru
Telp. (0761) 8010500
- 3. Palembang**
Jl. Residen Abdul Rozak No. 15,
Kel Bukit Sangkal, Kec Kalidoni
Palembang
Telp. (0711) – 563 0767
- 4. Jakarta 1**
MNC Tower Lantai 23
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Telp. (021) 3910 993
- 5. Jakarta 2**
MNC Tower Lantai 23
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Telp. (021) 3910 993
- 6. Bandung**
Jl. Naripan No. 97A lt. 3A, Kel Kebon
Pisang, Kec. Sumur Bandung 40112
Telp. (022) 20545686
- 7. Semarang**
Wisma HSBC Lantai 5 suite 501
Jl. Gajah Mada No. 135
Semarang 50134
Telp. (024) 8456434
- 8. Surabaya**
Gedung Bursa Efek Lantai 3A
Jl. Taman Ade Irma Suryani Nasution
No. 21
Surabaya
Telp. (031) 5353667
- 9. Denpasar**
Gedung Indovision-Bali Lantai 1 Unit E
Jl Diponegoro No. 109
Bali
Telp. (0361) 231289
- 10. Banjarmasin**
Jl. Pangeran Hidayatullah No. 18 RT 14
Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara
Kalimantan Selatan 70121
Telp. (0511) 674 1017
- 11. Balikpapan**
Gedung MNC Bank lt. 2,
Jl. Jend. Sudirman No. 327, Kel. Damai
Kec. Balikpapan Selatan 76114
Telp. (0542) 8519923
- 12. Makassar**
Jl. Gunung Latimojong 46B
Kel. Maradekaya Selatan, Makasar
Sulawesi Selatan 90141
Telp. (0441) 363 4643

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT MNC Guna Usaha Indonesia ("Perseroan") didirikan dengan nama PT Indo Finance Perkasa pada tahun 1994. Pada 4 Desember 2014, PT MNC Kapital Indonesia Tbk mengambilalih kepemilikan PT Indo Finance Perkasa. Seiring dengan akuisisi tersebut, Perseroan berganti nama menjadi PT MNC Guna Usaha Indonesia (atau lebih dikenal dengan MNC Leasing).

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan anggaran dasar dan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha pembiayaan investasi, yaitu melakukan kegiatan dalam bentuk sewa pembiayaan (*finance lease*), jual dan sewa balik (*sale and leaseback*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- a. Menjalankan usaha pembiayaan modal kerja, yaitu melakukan kegiatan dalam bentuk jual dan sewa balik (*sale and leaseback*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*), anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring without recourse*), fasilitas modal usaha dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Menjalankan usaha pembiayaan multiguna, yaitu melakukan kegiatan dalam bentuk sewa pembiayaan (*finance lease*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan/atau pembiayaan lain setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Menjalankan usaha pembiayaan lainnya dengan tetap berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku;
- d. Melakukan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERSEROAN

Visi

Menjadi Perusahaan Pembiayaan dengan aset di atas 5 Triliun pada tahun 2025

Misi

Memberikan solusi terhadap kegiatan usaha dengan memberikan pelayanan jasa pembiayaan yang inovatif untuk klien, baik perusahaan ataupun individu.

Nilai-Nilai Perseroan

Vision

Cara pandang jauh kedepan untuk menjawab segala tantangan yang ada di masa depan.

Quality

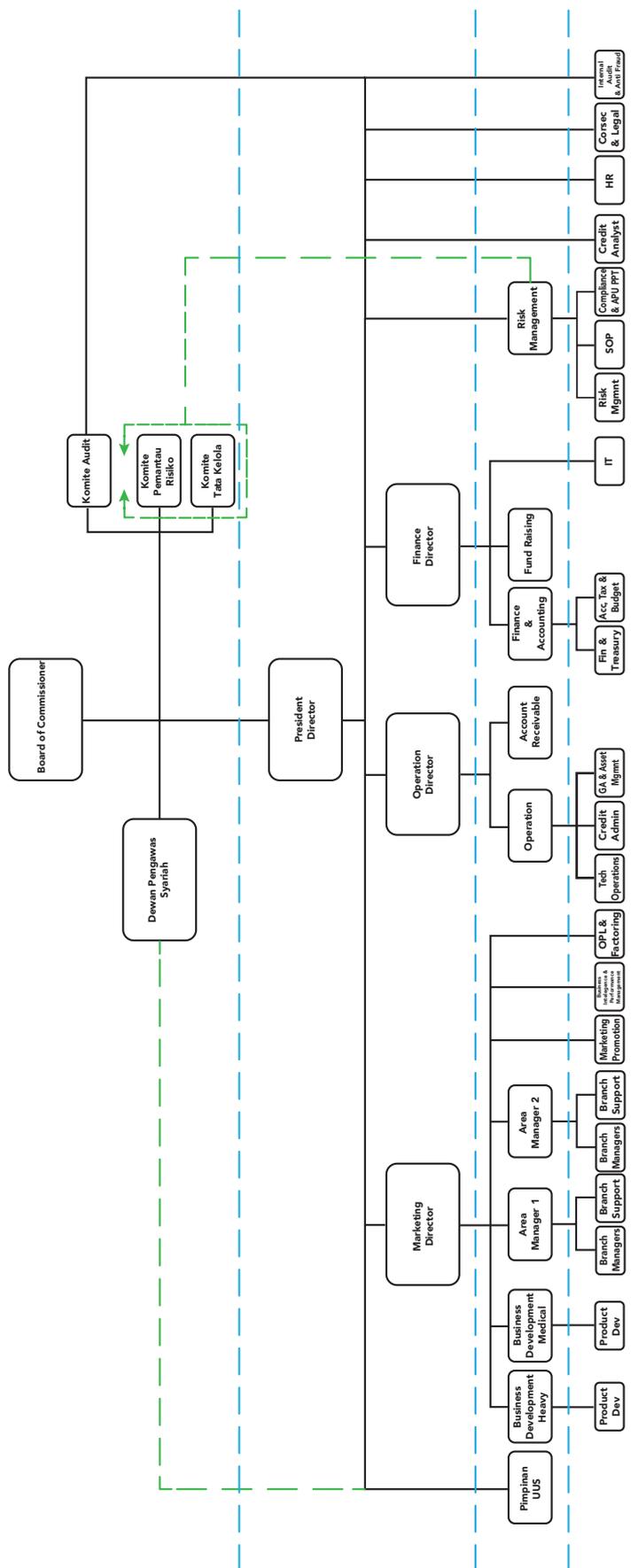
Semua yang dikerjakan harus dengan standar kualitas yang baik/bagus.

Speed

Kecepatan dalam melaksanakan segala sesuatu.



STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



SUMBER DAYA MANUSIA

Menghadapi persaingan usaha di tahun 2018, manajemen menetapkan strategi yang berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk itu dilakukan perbaikan terhadap proses rekrutmen karyawan baru yang menjamin ketersediaan SDM secara cepat dan tepat termasuk di dalamnya ketersediaan calon pemimpin masa depan.

Perseroan senantiasa menjaga kualitas, kuantitas dan kenyamanan situasi kerja bagi Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Perseroan meyakini bahwa SDM yang kompeten serta dukungan lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan produktivitas kinerja secara signifikan. Selain menempatkan SDM sebagai aset yang berharga bagi Perseroan, Perseroan senantiasa berinvestasi terhadap SDM yang dimiliki. Investasi telah dilakukan mulai dari proses rekrutmen melalui penetapan standar-standar kebijakan sampai dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM.

Untuk mengimbangi pertumbuhan bisnis Perseroan yang terus tumbuh setiap tahunnya, pengembangan dan penyempurnaan terus dilakukan dari berbagai sisi organisasi manajemen SDM. Manajemen SDM menyadari bahwa sebagai salah satu kekuatan Perseroan dalam menghadapi tantangan bisnis Perseroan, mengembangkan organisasi manajemen SDM dan peningkatan kompetensi SDM Perseroan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan efektif agar menciptakan organisasi dan SDM yang handal, terpercaya, dan kompeten.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 159 orang, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Adapun komposisi karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:



a. Menurut Jenjang Pendidikan

SMU / SMK Sederajat	: 2 Orang
Diploma	: 13 Orang
S1	: 137 Orang
S2	: 7 Orang



b. Menurut Jenjang Manajemen

Staff	: 100 Orang
Supervisor	: 22 Orang
Ast Mgr & Manager	: 32 Orang
GM	: 2 Orang
Direksi	: 3 Orang



c. Menurut Jenjang Usia

20 – 29 Tahun	: 57 Orang
30 – 39 Tahun	: 74 Orang
40 – 49 Tahun	: 25 Orang
>50 Tahun	: 3 Orang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan telah menyesuaikan gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) pada masing-masing Kantor Perwakilan, selain itu Perseroan juga menyediakan berbagai tunjangan, fasilitas dan sarana fisik lainnya yaitu:

- Tunjangan makan dan transportasi.
- Tunjangan dan fasilitas kesehatan berupa, penggantian uang pengobatan dan perawatan bagi karyawan serta anggota keluarganya.
- Program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi seluruh karyawan.
- Fasilitas olah raga.
- Koperasi Karyawan.
- Dana Pensiun.
- Tempat peribadatan.
- Fasilitas asuransi jiwa.



PEMEGANG SAHAM

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		Presentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	748,000	748,000,000,000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
- PT MNC Kapital Indonesia Tbk	186,999	186,999,000,000	99.999
- Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	1,000,000	0.001
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	187,000	187,000,000,000	
Jumlah saham dalam portepel	561,000	561,000,000,000	

CATATAN PENERBITAN MTN PERSEROAN

(Dalam Miliar Rupiah)

Nama MTN	Jumlah MTN	Peringkat	Tahun
Medium Term Notes I MNC Leasing Tahun 2017 Seri A	21	idBBB (cg)	2017
Medium Term Notes I MNC Leasing Tahun 2017 Seri B	50	idBBB (cg)	2017
Medium Term Notes II MNC Leasing Tahun 2018	20	idBBB (cg)	2018
Medium Term Notes III MNC Leasing Tahun 2018 Seri A	15	idBBB (cg)	2018

PENGHARGAAN YANG DITERIMA PERSEROAN



Penghargaan : Warta Ekonomi Indonesia *Multifinance Consumer Choice Award*
 Kategori : *Multifinance Company with Excellent Performance*
 Lembaga : Majalah Warta Ekonomi



Penghargaan : Infobank *Multifinance Award*
 Kategori : *Kinerja keuangan 2017 Sangat Bagus*
 Lembaga : Majalah Infobank

NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Panin Tower Senayan City, 17th Floor
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN I dan MTN II : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Gedung Arthaloeka Lantai 4
Jl. Jenderal Sudirman Jakarta 10220
Telp. 021 2511 448-449 ext 332/352/356/360
Fax. 021 2511 508 | Website: www.bankbjb.co.id

Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN III : PT Bank Bukopin Tbk
Gedung Bank Bukopin
Jl. MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
Telp. 021 7988 266 / 021 7989 837
Fax. 021 7980 625 / 021 7980 238
Website: www.bukopin.co.id

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang MTN baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang MTN sesuai dengan syarat-syarat MTN, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris : Leolin Jayayanti, SH., M.Kn.
Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170
Telp. 021 72787232 | Fax. 021 723 4607

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Terbatas MTN, antara lain Perjanjian Penerbitan, Perjanjian Agen Pemantau dan Jaminan, Pengakuan Hutang, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Konsultan Hukum : Hendro & Kanon
Graha Binaraksa Lt. 4
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18 Jakarta 12940
Telp. 021 527 7130 | Fax. 021 527 7132
Website: www.hendrokanon.com

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan segi hukum terbatas atas fakta yang ada mengenai Perseroan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil Pemeriksaan tersebut menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Terbatas ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi Afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN





Pembahasan Dan Analisis Manajemen

LAPORAN ANALISA USAHA DAN OPERASIONAL

Nilai Pembiayaan oleh Perseroan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Desember 2018, industri pembiayaan tumbuh sebesar 4,75%. Dengan pertumbuhan industri pembiayaan yang dapat dikatakan cukup lamban, Perseroan terus meningkatkan performa dan menghasilkan peningkatan unit yang dibiayai, pada tahun 2018 Perseroan membukukan nilai pembiayaan sebesar Rp. 1.049 miliar meningkat 48,7% dibandingkan tahun 2017

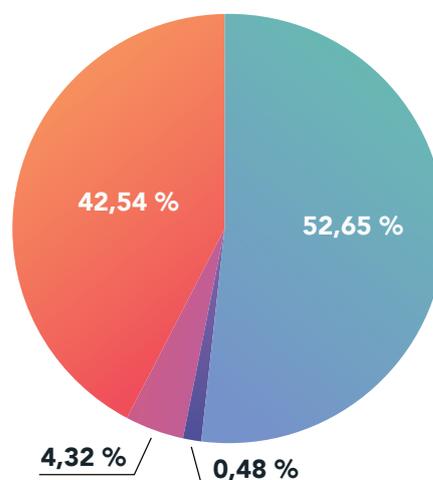
Dengan demikian, pada akhir tahun 2018, total aset Perseroan telah mencapai kurang lebih Rp. 788,3 miliar (*asset on book*) sedangkan total aset yang dikelola pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.013,4 terjadi peningkatan sebesar 40,54% jika dibandingkan dengan Rp. 721,09 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Secara *asset on book* terjadi peningkatan sebesar 11,88% jika dibandingkan dengan Rp. 704,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

Komposisi Pembiayaan Tahun 2018

Dengan tetap memperhatikan kualitas pembiayaan yang dilakukan, total nilai pembiayaan investasi & modal kerja, pembiayaan multi guna, sewa kendaraan operasional, & anjak piutang berturut-turut adalah Rp. 552,43 miliar, Rp. 5,07 miliar, Rp. 45,37 miliar, & Rp. 446,39 miliar.

Dengan demikian, kontribusi portofolio alat berat, truck, mesin dan alat kesehatan terhadap total pembiayaan investasi Perseroan berturut-turut adalah 72,33%, 21,01%, 3,10%, dan 3,56%

Pembiayaan 2018



Jaringan Usaha

Pada akhir tahun 2018, Perseroan memiliki 12 titik pelayanan pelanggan yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Sumber Pendanaan

Perseroan terus mengupayakan ketersediaan dana yang optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Sebagai sumber pendanaan, selama tahun 2018 Perseroan menerbitkan MTN dengan nilai Rp.35 miliar, joint finance dengan MNC Bank dengan total sebesar Rp.200 miliar serta pendanaan dari perbankan lainnya dengan total sebesar Rp.264 miliar.

Teknologi Informasi

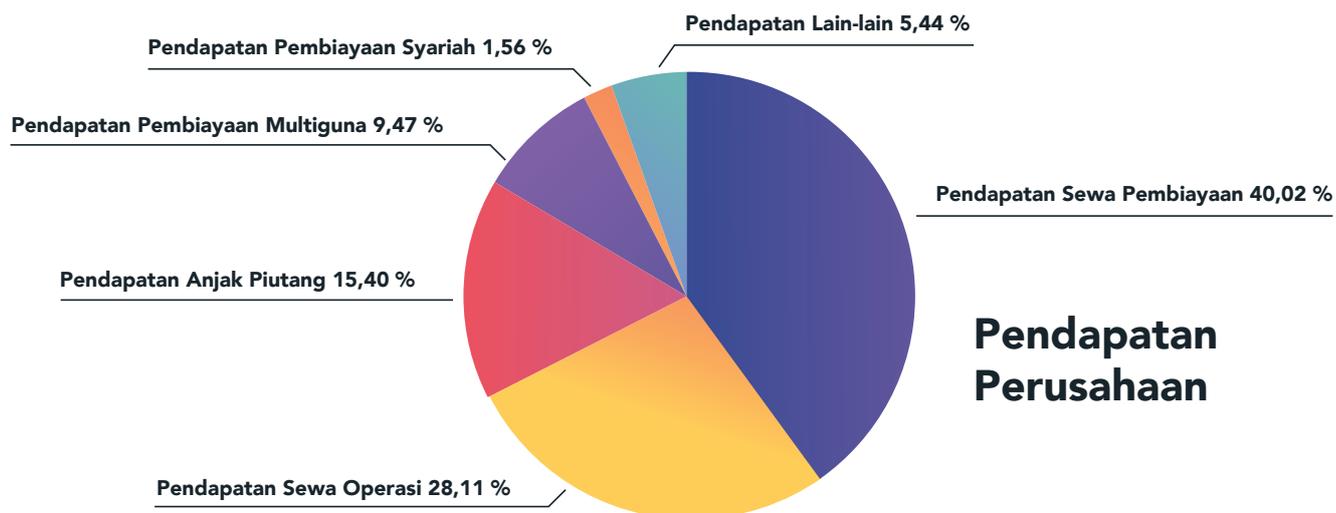
Di tahun 2018, Perseroan juga terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem informasi yang mendukung proses bisnis berbasis teknologi untuk mendukung perbaikan proses, pengembangan dan inovasi bisnis. Infrastruktur teknologi informasi juga diperbaharui dan direnovasi yang prosesnya akan berlanjut hingga tahun 2019.



Laporan Analisa Keuangan

Laporan Laba Rugi

Diakhir tahun 2018, dengan peningkatan sebesar 39,21% atas total piutang pembiayaan yang dikelola, Perseroan membukukan jumlah Pendapatan sebesar Rp. 160,6 miliar, meningkat sebesar 38,17% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 sebesar Rp. 116,2 miliar.



Jumlah Pendapatan Perseroan sebesar Rp. 160,6 miliar pada tahun 2018, diperoleh dari Pendapatan Sewa Pembiayaan sebesar Rp. 64,3 miliar, Pendapatan Sewa Operasi sebesar Rp. 45,1 miliar, Pendapatan Anjak Piutang sebesar Rp. 24,7 miliar, Pendapatan Pembiayaan Konsumen sebesar Rp. 15,2 miliar, Pendapatan Pembiayaan Syariah sebesar Rp. 2,5 miliar dan Rp. 8,8 miliar pendapatan lain-lain. Komposisi pendapatan Perseroan dari Pembiayaan

Sewa Pembiayaan, Sewa Operasi, Pembiayaan Anjak Piutang, Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Syariah dan lain-lain berturut-turut adalah 40,02%, 28,11%, 15,40%, 9,47%, 1,56% dan 5,44%.



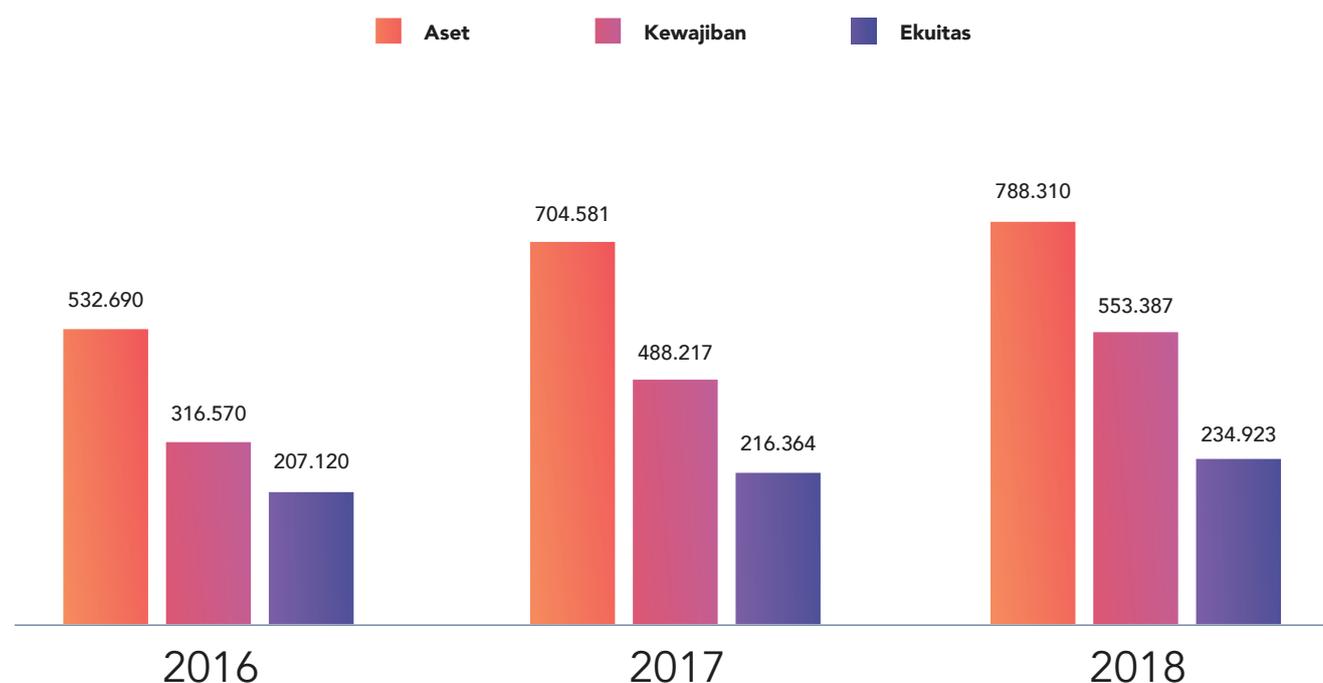
(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)
Jumlah Pendapatan	71,163	116,226	160,589
Jumlah Beban	64,727	100,624	128,476
Laba Sebelum Pajak	6,436	15,602	32,113
Beban Pajak Penghasilan	(1,212)	(3,782)	(7,891)
Laba Bersih (Laba Neto)	5,224	11,820	24,222

Jumlah Beban Perseroan juga mengalami kenaikan sejalan dengan pertumbuhan usaha dan mencapai Rp. 128,5 miliar pada tahun 2018 dari sebesar Rp. 100,624 miliar pada tahun 2017. Kenaikan Beban pada tahun 2018 disebabkan oleh kenaikan beban bunga atas kenaikan pinjaman dari kreditur dan kenaikan biaya operasional antara lain kenaikan biaya penyusutan sehubungan dengan penambahan aset tetap operasi dan kenaikan biaya gaji dan tunjangan disebabkan karena penambahan jumlah tenaga kerja untuk mendukung operasional perusahaan. Kenaikan beban tersebut seiring dengan kenaikan nilai piutang yang dikelola oleh Perusahaan. Dengan pencapaian ini, Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih untuk tahun 2018 sebesar Rp. 24,22 miliar atau meningkat sebesar 104,9% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 11,82 miliar.

Neraca

Pada akhir tahun 2018, total aset yang dikelola Perseroan telah mencapai kurang lebih Rp.788,3 miliar (*asset on book*) sedangkan total *asset managed* pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.013,4 miliar terjadi peningkatan sebesar 40,54% jika dibandingkan dengan Rp.721,09 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Secara *asset on book* terjadi peningkatan sebesar 11,88% jika dibandingkan dengan Rp.704,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Pertumbuhan Aset dikontribusikan pertumbuhan Piutang Pembiayaan oleh Perseroan sebesar 39,21% atau sebesar Rp.235,42 miliar.





Seiring dengan peningkatan aset, Perseroan juga mencatatkan kewajiban sebesar Rp.553,3 miliar pada akhir tahun 2018 meningkat 13,35% dibandingkan Rp.488,22 miliar pada akhir tahun 2017.

Dengan bertumbuhnya Aset produktif, dibukukannya peningkatan Laba Bersih dan setelah dilakukannya pembagian dividen kepada para Pemegang Saham, maka pada akhir tahun 2018, ekuitas Perseroan meningkat sebesar 8,58% menjadi Rp.234,92 miliar dari Rp.216,36 miliar pada tahun 2017.

Managemen Risiko

Terdapat 7 (tujuh) jenis risiko yang wajib dikelola MNC Leasing sebagai perusahaan pembiayaan, sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Penerapan Managemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yaitu:

- Risiko strategi;
- Risiko operasional;
- Risiko aset dan liabilitas;
- Risiko kepengurusan;
- Risiko tata kelola;
- Risiko dukungan dana; dan
- Risiko pembiayaan.

Atas 7 (tujuh) jenis risiko di atas, MNC Leasing wajib melakukan *Self Assessment* Managemen Risiko dan Penilaian Tingkat Risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan, selambat-lambatnya akhir bulan Februari.

Penerapan managemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif di Perseroan, disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan, berpedoman pada Kebijakan Managemen Risiko MNC Leasing yang disusun berdasarkan peraturan dan surat edaran dari Otoritas Jasa Keuangan. Penerapan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
- Memiliki *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* (RART) per masing-masing jenis risiko yang dikelola oleh Perseroan dan dipantau secara berkala.
- Memiliki Departemen Managemen Risiko yang dibentuk guna memastikan proses penerapan managemen risiko mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian dapat dilaksanakan dengan menggunakan kerangka managemen risiko yang ada.
- Memiliki *Risk Oversight Committee* atau Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi atas penerapan managemen risiko dan memberikan saran dan rekomendasi langkah-langkah perbaikan dalam penerapan managemen risiko.
- Mengevaluasi secara terus menerus terhadap sistem informasi yang dipergunakan sehingga dapat menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada managemen.
- Memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
- Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
- Memantau kepatuhan Perseroan dengan prinsip pengelolaan Perseroan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Departemen Kepatuhan.
- Menyusun Laporan Risiko Terintegrasi setiap semester untuk dikonsolidasikan dan dilaporkan kepada OJK melalui Entitas Utama (PT MNC Bank Internasional, Tbk)

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di Perseroan yang berlandaskan kepada 5 (lima) pilar, yaitu:



a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko diantaranya melalui:

1. Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
2. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha MNC Leasing secara signifikan;
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala.

Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi telah mengelola aktivitas dan risiko-risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui persetujuan dan evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko.

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyusunan, persetujuan, penerapan serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko Perseroan. Pengawasan aktif Direksi dilakukan melalui forum Rapat Direksi, Rapat Mingguan, dan Pengarahan Pagi (*Morning Briefing*) setiap harinya.



b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Untuk mendukung implementasi Manajemen Risiko secara efektif, MNC Leasing telah menyusun dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko agar sesuai (*in line*) dengan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia, Tbk.

Perseroan telah memiliki beberapa dokumen kebijakan manajemen risiko merupakan acuan dasar yang bersifat strategis tentang penerapan manajemen risiko di MNC Leasing, antara lain:

1. Kebijakan Manajemen Risiko No. 001/KBJ-MNCGUI/2018 tanggal 2 Mei 2018
2. Kebijakan *Risk Appetite dan Risk Tolerance* No. 008/KBJ-MNCGUI/2018 tanggal 28 Maret 2018
3. Penetapan limit risiko di MNC Leasing mencakup limit per risiko dengan parameter-parameter yang ditetapkan oleh Manajemen. Limit Risiko tersebut secara berkala dilakukan *review* dengan persetujuan sampai dengan pejabat tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi atau *by system*.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko.

Proses manajemen risiko MNC Leasing mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Proses Identifikasi risiko dilakukan untuk menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya.

Proses pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang ditetapkan oleh regulator atau dengan menggunakan metode internal untuk metode yang belum ditetapkan secara khusus.

Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan cukup baik antara lain: melalui pemantauan terhadap mitigasi dan limit risiko yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Unit Bisnis/Unit Operasi (*risk taking unit*) sebagai pemilik risiko (*risk owner*) maupun oleh Departemen Manajemen Risiko sebagai *risk control unit*. Hasil pemantauan disajikan dalam rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan secara berkala dan Laporan *Integrated Risk Management* secara bulanan dengan menggunakan sistem.

Proses pengendalian risiko dilakukan terutama untuk mengelola risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha MNC Leasing. Strategi pengendalian risiko yang dilakukan oleh MNC Leasing adalah menerima risiko (*risk acceptance*), menghindari risiko (*risk avoidance*), memindahkan risiko (*risk transfer*) dan mengurangi risiko (*risk mitigation*).

Untuk mengantisipasi kondisi yang bersifat ekstrim, maka MNC Leasing melakukan stress testing untuk risiko kredit dan risiko dukungan dana (permodalan).

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Sistem informasi Manajemen Risiko ditujukan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dan memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat digunakan dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.

Pada level individual entitas, MNC Leasing memiliki *Risk Management Dashboard* yang berisi indikator risiko tertentu dipergunakan untuk mengukur dan memantau kejadian aktual dengan limit risiko yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan disampaikan kepada manajemen sebagai bahan evaluasi dan *warning system* untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengendalian risiko.

Pada level konglomerasi keuangan, MNC Leasing menggunakan *Integrated Risk Management System* yang merupakan sistem informasi manajemen risiko yang dipergunakan oleh seluruh anggota konglomerasi keuangan. Hasil pemantauan disampaikan kepada manajemen, perusahaan induk, dan entitas utama, termasuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

e. Sistem Pengendalian Internal Yang Menyeluruh

Kerangka kerja pengendalian internal MNC Leasing menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (*Three Lines of Defense*), yang masing-masing bekerja secara independen:



Line	Fungsi	Tanggung Jawab
1st Line	Risk Taking/Risk Owner	Bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (<i>Day to day risk management & control</i>)
2nd Line	Risk Control	Bertanggungjawab dalam penyusunan <i>framework</i> , kebijakan, prinsip, dan metodologi pengelolaan risiko
3rd Line	Risk Assurance	Bertanggungjawab dalam menilai secara independen efektifitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal



f. Pengelolaan 7 (Tujuh) Risiko Utama Sepanjang Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan wajib melakukan pengelolaan atas 7 (tujuh) jenis risiko, sebagaimana pada penjelasan berikut ini:

(1) Risiko Pembiayaan

- Risiko pembiayaan timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Di industri perusahaan pembiayaan, risiko pembiayaan dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional perusahaan pembiayaan, seperti risiko yang timbul dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah.
- Perseroan berupaya melakukan perbaikan kualitas manajemen dan pengendalian risiko pembiayaan dengan melakukan pengelolaan risiko pembiayaan pada tingkat individual maupun di tingkat portofolio.
- Perbaikan yang dilakukan mencakup seluruh aktivitas fungsional Perusahaan yang dapat menimbulkan risiko pembiayaan, secara *end to end process* dimulai dari proses inisiasi, pengambilan keputusan, pengikatan perjanjian pembiayaan, penentuan agunan, pencairan dan monitoring kinerja debitur pasca pencairan pembiayaan, pemantauan kualitas portofolio, dan kecukupan pencadangan.
- Perbaikan kualitas pengelolaan risiko pembiayaan dilaksanakan semakin intensif sepanjang tahun 2018, dengan melakukan antara lain beberapa aktivitas antara lain:
 - Perbaikan Kebijakan & Prosedur

Dalam hal ini, MNC Leasing melakukan evaluasi dan kaji ulang *Risk Appetite Statement (RAS)* dan *Risk Tolerance* yang telah didiskusikan dengan *Board of Commissioners*, yang mencakup antara lain:

- Aset per Akun Neraca terhadap Total Aset
 - Pembiayaan Kepada Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan
 - Pembiayaan Per Sektor Ekonomi terhadap Total Pembiayaan
 - Pembiayaan Per Kategori Portofolio terhadap Total Pembiayaan
 - Aset & TRA Kualitas Rendah terhadap Total Aset & TRA (Transaksi Rekening Administratif)
 - Aktiva Produktif & TRA Bermasalah terhadap Total Aset & TRA
 - Kredit Kualitas Rendah terhadap Total Pembiayaan
 - Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan
 - Pembiayaan Bermasalah Dikurangi CKPN Kredit Bermasalah terhadap Total Pembiayaan
 - CKPN Atas Pembiayaan terhadap Total Pembiayaan
- Revisi sebagian terhadap Standard Operating Procedure (SOP) Pembiayaan yang mengatur proses pembiayaan secara *end to end* melalui Surat Edaran Direksi.
 - Evaluasi terhadap limit dan kewenangan anggota Komite Pembiayaan secara berkala.
 - Review dan evaluasi, serta perbaikan terhadap perjanjian baku yang dipergunakan dalam penyaluran pembiayaan.
 - Perbaikan Proses Dokumentasi
Perbaikan proses dokumentasi dokumen terkait pembiayaan untuk menghindari kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen, antara lain dengan beberapa upaya:
 - Sentralisasi dokumen *File Marketing* di *Branch Support*.
 - Melakukan *stock opname* dokumen terkait pembiayaan seperti dokumen perjanjian, file marketing, dokumen jaminan, maupun dokumen giro/PDC pembayaran kewajiban nasabah secara berkala.
 - Pemantauan *to be obtained (TBO) document* yang lebih ketat oleh *Branch Support* terhadap seluruh *point of sales*.

- Maintain dan Pemantauan Kualitas *Account Receivables (AR)*
Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas *Account Receivables (AR)*, antara lain:
 - i. Membentuk *desk collection* untuk melakukan *reminder* maupun penagihan melalui telepon.
 - ii. Pemantauan yang lebih ketat dari Departemen AR terhadap kedisiplinan penerapan Surat Peringatan kepada nasabah yang menunggak.
 - iii. Perbaikan dalam komunikasi dan koordinasi dengan cabang-cabang dengan membagi wilayah pemasaran yang mana masing-masing dikelola oleh AR *Departement Head*.
 - iv. Penggunaan aplikasi SMS Blast untuk mengirimkan *sms reminder* kepada nasabah atas kewajiban yang harus dibayarkan maksimal hingga tanggal jatuh tempo.
- Perbaikan Garis Koordinasi Marketing & AR *Management*
Upaya perbaikan dalam komunikasi dan koordinasi antara pejabat di Kantor Pusat dengan cabang-cabang, sehingga lebih terstruktur dan efektif dengan membagi wilayah pemasaran yang mana masing-masing dikelola oleh Area Manager dan membagi wilayah manajemen AR yang mana masing-masing dikelola oleh Departemen AR Head.

(2) Risiko Operasional

- Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan, tidak berfungsinya atau ketidakcukupan proses internal, kesalahan manusia, sistem atau faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas operasional Perseroan.
- Risiko operasional dapat secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian baik secara finansial maupun non-finansial serta dapat menghambat Perseroan dalam mencapai keuntungan dan pertumbuhan.
- Perbaikan kualitas pengelolaan risiko operasional sepanjang tahun 2018, dilakukan antara lain melalui beberapa aktivitas antara lain:
 - Minimalisir *Human Error*
Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir *human error*, antara lain:
 - i. *Refreshment* dan pelatihan kepada *Branch Administrator* dan *Marketing* dalam hal aktivitas operasional yang terkait dengan pelaksanaan kerja sehari-hari.
 - ii. Mengurangi aktivitas yang dilakukan secara manual, dengan cara:
 - Pencetakan kontrak pembiayaan dilakukan melalui sistem.
 - Pencetakan Surat Peringatan dilakukan melalui sistem.
 - iii. Meningkatkan fungsi *check & control*.
 - iv. Peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan melalui pelaksanaan pelatihan yang sesuai dengan rencana
 - v. pelatihan dan disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi pegawai.
Menerbitkan petunjuk teknis penggunaan aplikasi dan sistem sehingga lebih jelas dalam melakukan penginputan atau penggunaan sistem.
 - Penerapan Strategi *Anti Fraud*
 - i. Penerbitan Kebijakan *Anti Fraud*, *Whistleblowing*, dan *Anti Gratifikasi*.
 - ii. Penerbitan SOP *Anti Fraud*.
 - iii. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh karyawan
 - iv. Perseroan memiliki sistem *whistleblowing* melalui email: **antifraudleasing@mncgroup.com** yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
 - v. Kampanye *Anti Fraud Awareness* kepada seluruh cabang dan unit kerja melalui email dan *morning briefing*.
 - vi. Pemeriksaan secara berkala oleh Departemen *Anti Fraud*.
 - Peningkatan Kualitas SDM
Unit HR bekerjasama dengan unit terkait untuk melakukan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai, baik pelatihan internal maupun eksternal. Pelatihan internal dilakukan terkait proses pembiayaan, serta training mengenai produk-produk Perseroan.



- Infrastruktur IT & System
 - i. Melakukan langkah-langkah perbaikan pada *IT Security* dan *IT Backup*, melalui program-program berikut:
 - Pembatasan akses ke jaringan terhadap *wifi* dan *port*;
 - *Back up* data secara *daily* melalui *backup server* dan *hard disk*, serta
 - Peningkatan *security* secara terintegrasi dengan menggunakan *iCloud system* yang dikelola oleh *holding company*.
 - ii. Melakukan pemantauan dan *maintain system IT* untuk mencegah terjadinya *downtime*.

(3) Risiko Tata Kelola

- Risiko Tata Kelola merupakan risiko kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perseroan.
- Perbaikan kualitas pengelolaan risiko tata kelola sepanjang tahun 2018, dilakukan antara lain melalui beberapa aktivitas antara lain:
 - Evaluasi dan revisi *governance documents*, antara lain:
 - i. Tata Tertib Direksi
 - ii. Tata Tertib Dewan Komisaris
 - iii. Kebijakan Manajemen Risiko
 - iv. Kebijakan Tata Kelola
 - v. Piagam Komite Tata Kelola
 - Pengurus dan pejabat level manajerial perusahaan menjalankan sertifikasi, antara lain:
 - i. Sertifikasi ahli pembiayaan dan sertifikasi manajemen risiko bagi Direksi
 - ii. Sertifikasi dasar pembiayaan bagi Dewan Komisaris
 - iii. Sertifikasi dasar manajerial bagi pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi
 - iv. Sertifikasi profesi di bidang penagihan bagi pegawai yang menangani bidang penagihan.

(4) Risiko Kepengurusan

Risiko kepengurusan merupakan risiko yang risiko kegagalan Perseroan dalam mencapai tujuan Perseroan akibat kegagalan Perseroan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Perbaikan kualitas pengelolaan risiko kepengurusan sepanjang tahun 2018, dilakukan antara lain melalui beberapa aktivitas antara lain:

- Menjaga komposisi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS minimal sesuai dengan ketentuan regulator.
- Pendidikan dan pelatihan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara berkala.
- Penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

(5) Risiko Dukungan Dana

Risiko dukungan dana merupakan risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada Perseroan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.

Nilai dukungan dana mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menyerap kerugian yang tidak terduga yang berasal dari pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan. Dalam menentukan dukungan dana, Perseroan mempertimbangkan aspek kemampuan permodalan dan tambahan permodalan.

Dalam hal mengelola risiko dukungan dana sepanjang tahun 2018, perusahaan melakukan hal-hal berikut:

- Perusahaan telah menetapkan *Risk Appetite Statement (RAS)* dan *Risk Tolerance* untuk risiko dukungan dana, yang meliputi antara lain:
 - NIM
 - BOPO
 - *Capital Ratio*
 - Menjaga rasio permodalan di atas 40% (empat puluh persen).
 - Melakukan efisiensi pengeluaran biaya untuk menjaga rasio BOPO.

(6) Risiko Aset & Liabilitas

Risiko aset & liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perseroan, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban Perseroan.

Dalam hal mengelola risiko aset & liabilitas sepanjang tahun 2018, Perseroan melakukan hal-hal berikut:

- Perseroan telah menetapkan *Risk Appetite Statement (RAS)* dan *Risk Tolerance* untuk risiko aset dan *liabilities*, yang meliputi antara lain:
 - *Gearing Ratio*.
 - *Current Ratio*.
 - *Cash Ratio*.
- Melakukan upaya-upaya penghimpunan dana terutama dari perbankan, melalui:
 - *Roadshow*.
 - *Bank Gathering*.
 - *Joint Financing*.

(7) Risiko Strategi

Risiko strategi dapat muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama Perusahaan.

Dalam hal mengelola risiko strategi sepanjang tahun 2018, perusahaan melakukan hal-hal berikut:

- Perusahaan telah menetapkan *Risk Appetite Statement (RAS)* dan *Risk Tolerance* untuk risiko strategi, yang mencakup antara lain Realisasi Aktual terhadap Rencana Bisnis (dinilai dari rasio *Return on Asset* dan *Return on Equity*).
- Penyusunan dan pemantauan atas rencana bisnis.
- Penyelenggaraan rapat kerja setiap semester guna melakukan evaluasi dan rencana perbaikan terhadap kinerja usaha.



TATA KELOLA PERUSAHAAN





Tata Kelola Perusahaan

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
- (2) Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang serta prioritas Perseroan.
- (3) Direksi wajib:
 - Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan.
 - Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan perundang-undangan peraturan yang berlaku.
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
 - Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen.
 - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
 - Dengan konsisten melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan.
 - Membangun dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.
- (4) Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.
- (5) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat membentuk komite sesuai kebutuhan Perseroan.
- (7) Mekanisme kerja dari para anggota Direksi Perseroan dibagi berdasarkan *job description* masing-masing.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- (1) Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.



- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
- (7) Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (8) Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (9) Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, Kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

- (1) Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan mengawasi aspek syariah kegiatan operasional pembiayaan syariah, antara lain Akad Pembiayaan Syariah dan praktik pemasaran pembiayaan syariah.
- (2) Pengawasan terhadap pembentukan produk pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas - kegiatan pembiayaan.
- (4) Me-review, menilai dan mengevaluasi pemenuhan kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah secara berkala atas transaksi-transaksi keuangan, termasuk kebijakan dan SOP Perseroan untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan dan praktek di lapangan.
- (5) Memberikan masukan dan nasihat serta rekomendasi atas rencana bisnis pembiayaan dengan prinsip syariah di dalam rapat DPS.
- (6) Mengawasi proses pengembangan produk baru kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah sejak awal sampai dengan diluncurkan.
- (7) Memberikan opini syariah dan persetujuan terhadap seluruh produk baru, kebijakan, SOP, akad-akad, sistem pencatatan (akuntansi) dan transaksi-transaksi syariah.
- (8) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atas produk-produk baru pembiayaan dengan prinsip syariah yang belum ada fatwanya.
- (9) Memberi nasihat dan saran kepada manajemen Perseroan dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah secara tepat dan konsisten, serta mendorong pengembangan dan pertumbuhan serta kinerja kegiatan pembiayaan syariah.
- (10) Mengadakan rapat rutin DPS.
- (11) Menghadiri rapat-rapat Direksi dan Komisaris apabila dipandang perlu.
- (12) Memeriksa dan meminta keterangan, informasi, penjelasan dan data pendukung dari pejabat Perseroan yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan, SOP dan akad-akad yang digunakan pada produk-produk dan aktivitas keuangan pembiayaan dengan prinsip syariah.
- (13) Mereview dan menyetujui seluruh kebijakan, sistem, SOP, produk yang terkait dengan prinsip syariah dan akad yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- (14) Dewan Pengawas Syariah wajib menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.
- (15) Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi secara lengkap dan tepat waktu.



2. RANGKAP JABATAN

Definisi rangkap jabatan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 perihal Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah MNC Leasing tidak memiliki rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

a. Rangkap Jabatan Direksi

No	Nama	Posisi di perusahaan	Posisi di perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain yang Dimaksud	Bidang usaha
1	Paulus Cholot Janala	Direktur Utama	N/A	N/A	N/A
2	Yusnandi Liauw	Direktur	N/A	N/A	N/A
3	Meita Liliarsari	Direktur	N/A	N/A	N/A

b. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

No	Nama	Posisi di perusahaan	Posisi di perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain yang Dimaksud	Bidang usaha
1	Wito Mailoa	Komisaris Utama	N/A	N/A	N/A
2	Erdie S. Manan	Komisaris Independen	N/A	N/A	N/A

c. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Posisi di perusahaan	Posisi di perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain yang Dimaksud	Bidang usaha
1	Muhamad Nadrattuzaman Hosen	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah	PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Pembiayaan
			Dewan Pengawas Syariah	PT Treasure Fund Investama	Investasi
			Dewan Pengawas Syariah	PT GAP Capital	Investasi
2	Jaenal Effendi	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah	PT Tifa Finance Tbk	Pembiayaan



3. PELATIHAN

a. Pelatihan/Workshop/Seminar/Pembicara Direksi

No	Nama	Pelatihan/ Pembicara	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	Paulus Cholot Janala – Direktur Utama	Sertifikasi Profesi Ahli Pembiayaan	13 Februari 2018	SPPI	Hotel Le Meridien, ruang Puri Asri
		Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Satu Level Dibawah Direksi Yang Membawahi Manajemen Risiko Pada Perusahaan Pembiayaan	17 April 2018	PT. Daya Makara UI	Hotel Athlete Century Park, Lounge 6 Lantai. 6, Jakarta
		Seminar Info Bank	06 September 2018	APPI	Hotel Le Meridien, Sudirman
		Seminar Nasional “Peluang & Tantangan Tahun 2019” (Seminar untuk Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali dan Dewan Pengawas Syariah”	15 September 2018	APPI	Ballroom The Ritz Carlton Hotel - Pacific Place, Jakarta SCBD, Jl. Jendral Sudirman No. 52-53 - Jakarta
2	Yusnandi Liauw – Direktur	Seminar Sosialisasi BMPPVI & OJK “Meningkatkan Peran Mediasi Sebagai Sarana Alternatif Penyelesaian Sengketa Di sektor Pembiayaan, Pegadaian & Modal Ventura	26 Juni 2018	BMPPVI	Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. KKO Usman 44-48 Jakarta Pusat
		Training Sertifikasi Dasar Pembiayaan	2 Mei 2018	APPI	Swiss Belhotel - Mangga Besar, Jakarta Barat
		Seminar “Training for Trainer”	13 & 18 Sep- tember 2018	APPI	Kota Kasablanka Tower A Lantai 7 Unit D, Jl. Casablanca Kav 88
		Ujian Sertifikasi Dasar Manajerial	07 November 2018	APPI	STMT Trisakti Rawasari
		Seminar Nasional “Peluang & Tantangan Tahun 2019” (Seminar untuk Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali dan Dewan Pengawas Syariah”	15 November 2018	APPI	Ballroom The Ritz Carlton Hotel - Pacific Place, Jakarta SCBD, Jl. Jendral Sudirman No. 52-53 - Jakarta
3	Meita Liliarsari – Direktur	Seminar Nasional “Industri Pembiayaan di Pasar Modal”	26 Juli 2018	APPI	Raffles Hotel Dian Ballroom Lantai 11 Ciputra World Jl. Prof. Dr. Satrio No. 3-5, Jakarta
		Seminar Info Bank	06 September 2018	APPI	Hotel Le Meridien, Sudirman

**b. Pelatihan/Workshop/Seminar Dewan Komisaris**

No	Nama	Pelatihan/ Pembicara	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	Erdie S. Manan – Komisaris Independen	Seminar Nasional ‘Perusahaan Pembiayaan di Mata Perbankan	8 Mei 2018	APPI	Le Meridien Hotel, Jakarta
		Seminar Nasional “Peluang & Tantangan Tahun 2019” (Seminar untuk Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali dan Dewan Pengawas Syariah”	15 November 2018	APPI	Ballroom The Ritz Carlton Hotel - Pacific Place, Jakarta SCBD, Jl. Jendral Sudirman No. 52-53 - Jakarta

c. Pelatihan/Workshop/Seminar Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Pelatihan/ Pembicara	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	Muhamad Nadratuzzaman Hosen – Ketua DPS	Dosen Tamu Kuliah Umum Ekonomi Syariah – Universitas Sriwijaya	9 April 2018	Universitas Sriwijaya	Palembang, Universitas Sriwijaya
		Pembicara pada Sosialisasi Asuransi Syariah dengan tema “Syariah is Now”	14 Agustus 2018	Allianz Syariah	Solo
2	Jaenal Effendi – Anggota DPS	Workshop Pra-Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2018 Bidang Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah	11 Oktober 2018	DSN-Majelis Ulama Indonesia	Gedung MUI Pusat, Jakarta Pusat

4. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**a. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris**

Selama Tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Tugas Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan melalui evaluasi dan rapat-rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2018, antara lain meliputi:

- (1) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas Pembiayaan antara lain memberikan saran dan pendapat atas keputusan Direksi terhadap pemberian fasilitas Pembiayaan di atas jumlah tertentu yang wajib memperoleh Opini dari Komisaris.
- (2) Melakukan pengawasan terhadap kewenangan dan limit Komite Pembiayaan sehingga dilakukan secara berjenjang dan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (3) Bersama dengan Direksi, menetapkan *Risk Appetite Statement (RAS) & Risk Tolerance*.
- (4) Mengawasi perkembangan tindak lanjut atas temuan audit.
- (5) Mengawasi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direksi.



- (6) Mengawasi perkembangan dan tingkat eksposur risiko.
- (7) Mengawasi pelaksanaan penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Penerapan Terorisme.
- (8) Mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan di Perseroan.
- (9) Melakukan pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola pada Perseroan.
- (10) Memberikan persetujuan terhadap kebijakan yang akan diberlakukan di Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No	Perihal	Nomer	Tanggal
1	Kebijakan <i>Whistleblowing</i> , <i>Antifraud</i> , dan Anti Gratifikasi	007/KBJ-MNCGUI/2018	02 Januari 2018
2	Permohonan Penandatanganan Pakta Integritas	009/MNCGUI/DIR-IOM/I/2018	15 Januari 2018
3	Piagam Komite Tata Kelola	003/CHT-MNCGUI/2018	19 Januari 2018
4	Kebijakan <i>Risk Appetite & Risk Tolerance</i>	008/KBJ-MNCGUI/2018	28 Maret 2018
5	Kebijakan Manajemen Risiko	001/KBJ-MNCGUI/2018	2 Mei 2018
6	Kebijakan Tata Kelola (Ed. 2)	002/KBJ-MNCGUI/2018	26 Maret 2018
7	Permohonan Persetujuan atas Kebijakan <i>Whistleblowing</i> , <i>antifraud</i> , dan antigratifikasi	003/MNCGUI/DIR-IOM/I/2018	4 Januari 2018
8	Permohonan Persetujuan Perubahan Keanggotaan dan Wewenang Komite Pembiayaan	069/MNCGUI/DIR-IOM/III/2018	6 Maret 2018
9	Permohonan Persetujuan terhadap Perubahan Kewenangan Pemberian Rekomendasi atas Usulan Pembiayaan	017/MNCGUI/DIR-IOM/V/2018	4 Mei 2018
10	Piagam Audit Internal	004/CHT-MNCGUI/2018	08 Oktober 2018
11	Tata Tertib Dewan Komisaris	006/CHT-MNCGUI/2018	23 Oktober 2018
12	Permohonan Persetujuan terhadap Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP)	020/MNCGUI/DIR-IOM/XI/2018	8 November 2018

b. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah secara aktif memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) di PT MNC Guna Usaha Indonesia, antara lain melalui:

- (1) Mengadakan rapat rutin DPS
- (2) Memberikan masukan dan nasihat serta rekomendasi atas rencana bisnis pembiayaan dengan prinsip syariah di dalam rapat DPS.
- (3) Memberikan persetujuan atas skema pembiayaan *factoring syariah without recourse*.
- (4) Memberikan persetujuan Akad Anjak Piutang Syariah *without recourse*.



5. PELAKSANAAN TUGAS KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen akan melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender dalam hal ditemukannya:

- pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
- keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen diangkat sebagai Ketua Komite Audit.

Komisaris Independen juga ditunjuk sebagai Ketua Komite Tata Kelola, untuk memastikan untuk memastikan pengawasan yang lebih independen terhadap penerapan tata kelola di Perusahaan. Melalui rapat Komite tersebut dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Komisaris Independen melakukan pemantauan dan memberikan nasihat, serta rekomendasi kepada Direksi sebagai bahan perbaikan.

Selain itu, Komisaris Independen juga diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, yaitu sebagai pihak independen untuk membantu mengawasi pelaksanaan dan penerapan manajemen risiko di Perseroan.

6. PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

a. Rapat Direksi

Selama tahun 2018, Direksi telah melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali sebulan dengan total rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Nama	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
				Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Paulus Cholot Janala	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	12	12	0	100%
2	Yusnandi Liauw	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	12	12	0	100%
3	Meita Liliyasi	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	12	12	0	100%
4	Ageng Purwanto *)	1 Januari 2018 – 1 Maret 2018	2	2	0	100%

*) berhenti menjabat per 1 Maret 2018.



Agenda Rapat Direksi

- Pembahasan *selling rate operating lease*.
- Menentukan daerah prioritas untuk *dedicated sales* untuk *medical equipment*.
- Reporting terkait collection serta pembahasan rekrutmen serta sertifikasi untuk collection pusat dan cabang.
- Pembahasan tentang sistem informasi untuk memastikan pemenuhan tentang tingkat kesehatan keuangan terkait terkait batas pemberian insentif ke pihak ketiga
- Pembahasan aplikasi *tracking Credit Analyst*.
- Pembahasan *gap analysis* untuk PSAK 71.
- Pembahasan mengenai seragam dan penyelenggaraan *training* karyawan.
- Pembahasan *progress* pengkinian data nasabah dalam rangka penerapan APU PPT.
- Pembahasan *road show* ke *supplier* alat kesehatan.
- *Update Stock Opname marketing file* dan giro.
- Pembahasan tentang *cross border financing*.
- Pembahasan proses restrukturisasi.
- Pembahasan tentang akun dorman.
- *Update policy* dan prosedur.
- Pembahasan tentang evaluasi perbaikan data terkait Manajemen Risiko.
- *Update* mengenai *progress website* perusahaan.
- *Update* tentang program-program pembiayaan.
- Penetapan standar *Receive Voucher (RV)* baru.
- Peningkatan proses status POS menjadi cabang.
- Pembahasan *support sales* untuk program SLB.
- Pembahasan *SMS Blast* sebagai salah satu upaya penagihan.
- Pembahasan rencana penyelenggaraan rapat kerja.
- Pembahasan gugatan nasabah.
- Pembahasan SLIK.
- *Update* terkait *to be obtain document (TBO)*.
- *Update tracking* aplikasi.

b. Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Nama	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
				Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Wito Mailoa	21 September 2018 – 31 Desember 2018	2	2	0	100%
2	Erdie Suriaherdadi Manan	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	4	4	0	100%
3	Totok Sugiharto *)	1 Januari 2018 – 26 Juni 2018	1	1	0	100%

*) berhenti menjabat per Juni 2018



Agenda Rapat Direksi

- Rekomendasi mengenai ketertiban dalam dokumentasi sebelum pencairan pembiayaan.
- Rekomendasi tentang pemenuhan personel Internal Audit dan masukan untuk prosedur audit.
- Rekomendasi agar memastikan sistem SMILE sudah *clear* dari berbagai permasalahan.
- Rekomendasi untuk korespondensi melalui *e-mail* dalam perjanjian dan memberikan saran agar perjanjian selalu di evaluasi.
- Rekomendasi agar komisi AO dan BM tidak hanya dilihat dari sisi financial namun juga dari sisi non finansial (seperti dokumentasi lengkap, perjanjian sudah dikembalikan, dsb).
- Rekomendasi agar BOD *me-review* dan memantau *reporting* yang berhubungan dengan materi untuk rapat komite.
- Rekomendasi agar *me-review* cabang dan mencari *root cause* dalam permasalahan-permasalahan cabang, agar cabang bisa lebih tumbuh dan efektif.
- Rekomendasi agar lebih mengontrol faktor-faktor biaya mengingat terjadi permasalahan funding yang perlu dicermati.
- Pelaksanaan penerapan APU PPT.

c. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Nama	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
				Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	M. Nadrattuzaman Hosen	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	6	6	0	100%
2	Jaenal Effendi	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	6	6	0	100%

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah

- Audiensi OJK Pembiayaan Factoring Syariah
- Pembahasan pendanaan untuk syariah
- Pembahasan jaminan dalam Pembiayaan Syariah
- Persetujuan DPS untuk pembiayaan *factoring syariah without recourse*
- Pembahasan Ujrah
- Pembahasan Skema *Factoring* Syariah
- Finalisasi perhitungan Ujrah



7. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

a. Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profil
1	Erdie S. Manan	Ketua	Sesuai Profil Komisaris Independen
2	Wito Mailoa	Anggota	Sesuai Profil Komisaris Utama
3	Natalia Purnama	Anggota	<p>Natalia Purnama lahir di Jakarta pada 1971. Saat ini berdomisili di Jakarta.</p> <p>Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1995.</p> <p>Beliau bergabung dengan MNC Group pada 1996 sebagai Analis Riset Perseroan hingga 1997. Kemudian sebagai Investment Banking Manager hingga 2011 dan melanjutkan karirnya menjadi Senior Vice President Treasury dan Corporate Finance MNC Group hingga 2014. Sejak 2014 hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur PT MNC Investama Tbk dan sejak Mei 2018 menjabat sebagai Direktur PT MNC Kapital Indonesia, Tbk.</p> <p>Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau mulai meniti karir sebagai Analis Data di PT HSBC Securities Indonesia d/h PT Wardley James Capel Indonesia pada 1995.</p>

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain sebagai berikut:

(1) Terkait Laporan atau Informasi Keuangan

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.

(2) Terkait Audit Internal

Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.

(3) Terkait Audit Eksternal

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.

(4) Terkait Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen/Direksi.

(5) Terkait Peraturan Perundang-undangan

Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.



(6) Terkait Pengaduan

- Menelaah pengaduan yang diterima Perseroan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
- Syarat pengaduan:
 - Disampaikan secara tertulis.
 - Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor.
 - Laporan mengenai penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, kecurangan (fraud) serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi Perseroan.
- Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukan audit investigasi dengan bekerjasama dengan manajemen, audit internal atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen.
- Komite Audit melaporkan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris dan memantau tindak lanjut hasil penelaahan bila diminta oleh Dewan Komisaris.

(7) Tugas lainnya

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.
- Melakukan review terhadap Piagam sesuai kebutuhan dan mengusulkan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dan para anggotanya secara berkala.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

c. Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Selama tahun 2018, Komite Audit telah menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Komite Audit, dengan rincian kehadiran masing-masing anggota, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Erdie S.Manan	Ketua	1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	4	4	100 %
2	Wito Mailoa *)	Anggota	24 September 2018 s.d 31 Desember 2018	3	3	100 %
3	Natalia Purnama *)	Anggota	24 September 2018 s.d 31 Desember 2018	3	3	100 %
4	Totok Sugiharto **)	Anggota	1 Januari 2018 s.d 24 September 2018	1	1	100 %
5	Mahjudin **)	Anggota	1 Januari 2018 s.d 24 September 2018	1	1	100 %

*) menjadi anggota Komite Audit per tanggal 24 September 2018

***) tidak menjabat lagi sebagai Komite Audit per tanggal 24 September 2018

**d. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya**

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Kerja Internal Audit Tahun 2018.	Telah dilakukan pemantauan atas Rencana Kerja Internal Audit Tahun 2018 melalui rapat Komite Audit.
2	Melakukan evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terkait dengan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2017.	Telah dilakukan evaluasi atas KAP dan hasil evaluasi telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2018	Telah dilakukan pembuatan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dan termasuk dalam dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Laporan Penunjukan KAP.
4	Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit.	Telah dilakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut untuk perbaikan oleh Direksi atas temuan-temuan audit internal dan eksternal audit melalui rapat Komite Audit.
5	Mengevaluasi hasil pelaksanaan Internal Audit dan kecukupan rencana tindak lanjut.	Telah dilakukan evaluasi secara berkala melalui Rapat Komite Audit atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Audit.

8. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE LAINNYA**a. Komite Pemantau Risiko**

- 1) Susunan Keanggotaan

Susunan dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Profil
Wito Mailoa	Ketua	Sesuai profil Komisaris Utama
Erdie Manan	Anggota	Sesuai profil Komisaris Independen
Mahjudin	Anggota	Mahjudin lahir di Palembang pada tahun 1971. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi - Jurusan Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta pada 1994. Bergabung dengan MNC Group melalui PT MNC Finance sebagai Direktur pada bulan Juli hingga September 2016. Beliau memulai karir sebagai Broker Saham Perdana di PT Lumbang Persada Khatulistiwa (1993-1994), kemudian di Divisi Sales PT Isuzu Astra International (1994-1995), lalu di PT Arthacakra Multifinance (Nisso Iwai Group) dengan posisi terakhir sebagai GM Operation (1995-2004), lalu di PT U Finance Indonesia (BTMU) dengan posisi terakhir sebagai GM Collection (2004-2007), dan PT SMS Finance dengan posisi terakhir sebagai Direktur Marketing (2017-2016). Sejak September 2016, menjabat sebagai Direktur Independen PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan per September 2018 turut menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko MNC Leasing.



(2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, dengan memberikan pendapat, saran, maupun rekomendasi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, seperti:

- Mengevaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko secara efektif.
- Melakukan penelaahan serta memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan terhadap laporan, usulan/permintaan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan review secara komprehensif dan memantau tingkat kesehatan keuangan perusahaan sesuai dengan *regulatory* parameter serta merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan tingkat kesehatan keuangan.
- Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.
- Setiap anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuai yang berhubungan dengan tugas Komite.
- Menyelenggarakan rapat secara rutin dan memastikan seluruh penyelenggaraan rapat terdokumentasi dengan tertib.

(3) Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko.

No	Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Wito Mailoa	Ketua	1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	4	4	100%
2	Mahjudin	Anggota	1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	4	4	100%
3	Erdie S. Manan *)	Anggota	24 September 2018 s.d 31 Desember 2018	3	3	100%
4	Totok Sugiharto **)	Anggota	1 Januari 2018 s.d 24 September 2018	1	1	100%
5	G. Andrew Haswin **)	Anggota	1 Januari 2018 s.d 24 September 2018	1	-	-

*) menjadi anggota Komite Pemantau Risiko per tanggal 24 September 2018

***) tidak menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko per 24 September 2018



(4) Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko di Perseroan	Pemantauan telah dilakukan melalui pembahasan secara berkala atas beberapa indikator utama dari seluruh jenis risiko yang dikelola, baik risiko secara individu maupun risiko secara terintegrasi konglomerasi keuangan. Atas pembahasan tersebut, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan penerapan manajemen risiko.
2	Pemantauan atas Risk Appetite & Risk Tolerance	Pemantauan telah dilakukan melalui pembahasan secara berkala dalam rapat Komite Pemantau Risiko.

b. Komite Tata Kelola

(1) Susunan Keanggotaan

Susunan dan keanggotaan Komite Tata Kelola per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Profil
Erdie S. Manan	Ketua	Sesuai profil Komisaris Utama
Mahjudin	Anggota	Sesuai profil Komite Pemantau Risiko
Susanty Tjandra Sanusi	Anggota	Susanty Tjandra Sanusi lahir di Jakarta pada tahun 1963. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Diploma of Banking dari Emile Woolf & Associates, London, Inggris pada tahun 1985. Beliau memulai karir sebagai Training Officer Citibank, N.A (1987-1990), kemudian di PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 1990-1997 dengan posisi terakhir sebagai Head of Training dan General Affairs. Selanjutnya Beliau menjadi Training Manager di PT. Unibank Tbk (1997-1999), HR Head PT Unibank Tbk (1999-2000), HR Generalist Citibank, N.A (2000-2005), HR Head Citibank, N.A (2005-2008), Regional HR Citibank, N.A (2008-2010), dan Head of HR Strategic Business Partner and Recruitment CIMB Niaga (2010-2013). Beliau bergabung di MNC Group sebagai Direktur PT MNC Investama Tbk (2013-2014) dan sejak tahun 2014 menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan Direktur Independen PT MNC Investama Tbk. Per September 2018, Beliau turut menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola di PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing).
Nurul Fikri Maulana	Anggota	Nurul Fikri Maulana lahir di Pekanbaru pada tahun 1988. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik - Jurusan Teknik Industri dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Beliau memulai karir sebagai Officer Development Program dengan posisi terakhir sebagai System & Procedure Analyst di PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (2011 - 2015), Kemudian di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan posisi terakhir sebagai integrated Risk & Policy Manager (2015-2017). Bergabung di MNC Group sejak Juli 2017 hingga saat ini menjabat sebagai Compliance & Risk Management Department Head dan per September 2018 turut menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola MNC Leasing.
Jessica Tanoesoedibjo	Anggota	Jessica Herliani Tanoesoedibjo lahir di Jakarta pada 1994. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Master of Arts in Education tahun 2018 dan Master of Arts in Biblical & Theological Studies tahun 2015 dari Biola University, Los Angeles, Amerika Serikat, gelar Master of International Trade & Commerce Law dari Macquarie University, Sydney, Australia tahun 2014, dan gelar Bachelor of Commerce dari University of New South Wales, Sydney, Australia tahun 2012. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Koordinator MNC STIE & STKIP, Jakarta dan sebagai Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk sejak Mei 2018 dan turut menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola MNC Leasing sejak September 2018.



(2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola

- Mengevaluasi dan merekomendasikan kerangka dan kebijakan Tata Kelola Perseroan;
- Memantau pelaksanaan Tata Kelola pada seluruh aktivitas bisnis Perseroan;
- Menilai konsistensi penerapan Tata Kelola dalam Perseroan dan kecukupan pengendalian intern di Perseroan;
- Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai ketidaksesuaian pelaksanaan Tata Kelola dan menyampaikan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam rangka perbaikan;
- Mengkaji laporan Tata Kelola yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi;
- Menyampaikan rekomendasi atas laporan dan kebijakan Tata Kelola Perseroan kepada Dewan Komisaris;
- Memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan di Perseroan;
- Memantau dan memberikan saran dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko tata kelola dan risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan;
- Menyusun, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan secara berkala;
- Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan.

(3) Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola

Nama	Posisi	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Erdie S. Manan	Ketua	1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	4	4	100%
Susanty Tjandra Sanusi	Anggota	1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	4	3	75%
Mahjudin	Anggota	1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018	4	2	50%
Nurul Fikri Maulana *)	Anggota	24 September 2018 s.d 31 Desember 2018	3	3	100%
Jessica Tanoesoedibjo *)	Anggota	24 September 2018 s.d 31 Desember 2018	3	2	67%
Mashudi Hamka **)	Anggota	1 Januari 2018 s.d 24 September 2018	1	-	-
Chastina Yolana **)	Anggota	1 Januari 2018 s.d 24 September 2018	1	1	100%

*) menjadi anggota Komite Tata Kelola per tanggal 24 September 2018

***) tidak menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola per 24 September 2018



(4) Program Kerja Komite Tata Kelola dan Realisasinya

No	Program Kerja	Realiasi
1	Melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip tata kelola di Perseroan	Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi, serta pemberian saran/rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan atas penerapan Tata Kelola di Perseroan melalui Rapat Komite Tata Kelola.
2	Memantau kelengkapan <i>governance documents</i> seperti tata tertib Direksi, DPS, Dewan Komisaris, dan piagam Komite.	Telah dilakukan pemantauan dan saran perbaikan untuk kelengkapan <i>governance documents</i> tersebut.
3	Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kerja Organ Utama Perseroan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Telah dilakukan secara berkala, antara lain dengan memantau pelaksanaan rapat, kecukupan komposisi masing-masing organ, kecukupan pelatihan dan pengembangan masing-masing organ, dan dengan memperhatikan rekomendasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
4	Melakukan pemantauan atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.	Telah dilakukan dengan memastikan pemantauan rasio dan indikator tertentu telah <i>comply</i> atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	Melakukan pemantauan atas penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme	Telah dilakukan, pemantauan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerja penerapan APU PPT. • Kecukupan kebijakan & prosedur APU PPT. • Pemastian pelatihan APU PPT telah dilaksanakan.

2. Penerapan Fungsi Kepatuhan Dan Auditor Internal

a. Fungsi Kepatuhan

- (1) Satuan Kerja atau Pegawai yang Melaksanakan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan di PT MNC Guna Usaha Indonesia berada dalam Departemen *Compliance & Risk Management* yang dibawah langsung oleh Direktur Utama.

- (2) Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan, PT MNC Guna Usaha Indonesia menerapkan Kerangka Kerja Kepatuhan, sebagai berikut:





Dengan menggunakan Kerangka Kerja Kepatuhan dimaksud, diharapkan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dapat mengarahkan organisasi pada Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerangka Kerja 01 – Compliance Policy

Dalam melaksanakan tugasnya, selain mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Fungsi Kepatuhan mengacu kepada ketentuan internal yang diatur dalam dokumen Kebijakan Kepatuhan.

Kebijakan Kepatuhan mengatur tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan, antara lain:

- Membuat kebijakan kepatuhan (*compliance policy*) termasuk melakukan kajian secara berkala agar tujuan kepatuhan dapat tercapai.
- Membuat langkah-langkah atau program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan fungsi penghubung (*liason officer*) dengan pihak regulator, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kepatuhan.
- Melaporkan fungsi kepatuhan dan status kepatuhan Perseroan kepada Direksi melalui Direktur yang membawahi kepatuhan.
- Berfungsi sebagai tempat bertanya seluruh karyawan mengenai hal-hal yang terkait dengan peraturan dan perundangan. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Unit Kepatuhan dapat meminta bantuan para ahli dari dalam maupun dari luar Perusahaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.
- Memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung ke unit bisnis maupun unit pendukung (*compliance testing*) Dalam melakukan pemeriksaan, wewenang yang diberikan meliputi akses untuk memeriksa semua bukti transaksi, catatan maupun dokumen.
- Unit Kepatuhan bertanggungjawab atas program pelatihan atau sosialisasi mengenai peraturan dan program kepatuhan lainnya.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Kerangka Kerja 02 – Compliance Monitoring

Untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan dan perundang-undangan, Fungsi Kepatuhan melakukan pemantauan secara berkala, antara lain:

- Pemantauan terhadap pembaruan, penerbitan, ataupun pencabutan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi Perusahaan Pembiayaan.
- Pemantauan terhadap rasio dan indikator tertentu yang telah ditetapkan oleh regulator, beberapa diantaranya mencakup indikator sebagai berikut:
 - Permodalan



- *Non Performing Financing* (NPF)
 - *Financing to Asset Ratio*
 - Ekuitas
 - Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)
 - *Gearing Ratio*
 - Anjak Piutang dengan Jaminan
 - Anjak Piutang Tanpa Jaminan
 - Tingkat Kesehatan Keuangan
 - Jumlah Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi
 - Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor
 - Penyertaan Langsung
 - Insentif kepada Pihak Ketiga
 - Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor
 - Anjak Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan Lainnya
 - Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana
- Pemantauan terhadap kepatuhan terhadap larangan yang ditetapkan oleh regulator, beberapa diantaranya mencakup:
 - Larangan melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur.
 - Larangan menjaminkan nilai piutang pembiayaan atas 1 (satu) Debitur kepada lebih dari 1 (satu) pihak yang memberikan pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan.
 - Larangan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat.
 - Larangan memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain.
 - Larangan memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan menggunakan jaminan berdasarkan hukum gadai.
 - Larangan menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.
 - Larangan melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menghindari/melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Kerja 03 – Compliance Review

Fungsi Kepatuhan melakukan *review* atau evaluasi berdasarkan hasil pemantauan, beberapa di antaranya mencakup:

- Review atas peraturan perundang-undangan yang diperbarui/revisi, diterbitkan, maupun dicabut untuk mengetahui dampak maupun *action plan* yang harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.
- Review terhadap ketentuan internal yang mencakup dokumen Kebijakan, *Standar Operating Procedure* (SOP) Surat Edaran (SE), Surat Keputusan (SK), dan Petunjuk Teknis.

**Kerangka Kerja 04 – Compliance Campaign**

Salah satu upaya untuk mewujudkan budaya kepatuhan adalah melalui kampanye kepatuhan, antara lain sebagai berikut:

- Melakukan reminder kewajiban pelaporan secara berkala kepada seluruh unit kerja yang bertanggung jawab (*in charge*) terhadap pelaporan dimaksud, baik melalui media tertulis seperti *email* dan internal memorandum, maupun media lisan/tatap muka seperti pada saat rapat dan *morning briefing*.
- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang relevan kepada unit kerja terkait.
- Memasang kalender kewajiban pelaporan di ruang kerja seluruh unit kerja yang bertanggung jawab (*in charge*) terhadap pelaporan.

(3) Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka menjadikan Fungsi Kepatuhan sebagai *strategic partner* bagi setiap lini organisasi, maka SDM Kepatuhan juga terus ditingkatkan dengan mengikutsertakan dalam pelaksanaan sertifikasi/seminar/*workshop* /pelatihan, seperti:

No	Kegiatan	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
1	Sosialisasi Penerapan dan Perkembangan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	Kasablanka Mall	30 Januari 2018
2	Sertifikasi Manajemen Risiko	BSMR	Hotel Athlete Century Park	17 April 2018
3	Workshop APU PPT	MNC Bank	Gedung Financial Center Lt. 13	29 Juni 2018
4	Workshop Tata Kelola Terintegrasi	MNC Bank	Gedung Financial Center Lt. 13	29 Juni 2018
5	Training Internal Control to Prevent Fraud	MNC Corporation	Conference Hall, iNews Center Lt.3	14 September 2018

(4) Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Fungsi APU & PPT melekat pada pejabat yang menjalankan Fungsi Manajemen Risiko, berada dalam Departemen *Compliance & Risk Management* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

(5) Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi dalam Menangani dan Menyelesaikan Pengaduan yang Diajukan Konsumen

Untuk memantau dan memastikan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan Konsumen, PT MNC Guna Usaha Indonesia membentuk Unit Pelayanan Nasabah yang berada di bawah supervisi *Business Development & Marketing Communication*.

b. Auditor Internal

(1) Ruang Lingkup Pekerjaan Audit

- Meyakinkan bahwa pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perseroan telah memadai dan berfungsi dengan baik.
- Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta prosedur Perseroan yang berlaku.
- Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen, dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya, dan tepat waktu.
- Menilai kecukupan sarana untuk memelihara dan melindungi aset Perseroan, dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan aset.
- Mengidentifikasi setiap potensi penghematan dan efektivitas biaya serta membuat rekomendasi dalam upaya meningkatkan terciptanya efisiensi dan efektivitas biaya.
- Melaksanakan penugasan khusus dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas, seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan, dan inefisiensi.

(2) Struktur atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

- Kepala Unit Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- Dalam struktur organisasi, Kepala Unit Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

(3) Independensi Auditor Internal

- Seluruh kegiatan yang dijalankan oleh Unit Internal Audit wajib senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam Perseroan termasuk masalah pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.
- Unit Internal Audit tidak memiliki tanggung jawab terhadap operasional atau kewenangan terhadap aktivitas Perseroan. Oleh karena itu, Unit Internal Audit tidak akan melakukan kegiatan operasional, penyusunan prosedur, pemasangan sistem, pencatatan, atau terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat mengganggu penilaian Unit Internal Audit.
- Unit Internal Audit wajib menunjukkan tingkatan objektivitas tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Unit Internal Audit wajib membuat penilaian berimbang mengenai seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain.

(4) Uraian Tugas Satuan Kerja Audit Internal

- Merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Perseroan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
- Menyusun Rencana Audit Tahunan (RAT) berikut anggarannya, baik pemeriksaan manajemen operasional yang bersifat rutin maupun audit khusus (tematik), yang dilakukan di cabang, unit kerja tertentu atau divisi tertentu di Kantor Pusat.
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objective tentang kegiatan yang diperiksa kepada manajemen serta tindakan yang perlu diambil sebagai penanganan atas hasil pemeriksaan terbatas pada pelaporan dan pengungkapan.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut secara berkala kepada Direktur Utama dan secara triwulanan kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit.



- Melakukan perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kualitas audit serta melakukan pengembangan teknik audit untuk memperkuat pengendalian intern Perseroan.
- Atas rekomendasi yang diberikan, Audit Internal bertanggung jawab memantau, menganalisa, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan dari auditee kepada manajemen. Dalam hal auditee tidak menindaklanjuti temuan sebagaimana rekomendasi audit, maka hal tersebut akan turut dilaporkan kepada manajemen dan mempengaruhi audit rating berikutnya.
- Mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan pemeriksa ekstern sehingga dapat dicapai hasil audit yang optimal.
- Melaksanakan investigasi terhadap hal-hal yang diduga atau terindikasi *fraud*, dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

(5) Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Internal Audit dikepalai oleh Angga Surya Putra Perdana, selaku Internal Audit & Anti Fraud Departemen Head yang merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk pada Tahun 1985. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau berkarir di bidang asuransi jiwa pada PT Great Eastern Life Indonesia sebagai *Head of Regulatory Compliance* dan sebelumnya sebagai *Internal Audit Dept. Head* pada perusahaan pembiayaan seperti PT Mandiri Tunas Finance dan PT CIMB Niaga Auto Finance.

(6) Jumlah Pegawai Pada Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal terdiri dari 2 (dua) orang pegawai termasuk Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

(7) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Selama tahun 2018, Audit Internal telah melakukan pemeriksaan dengan objek pemeriksaan, antara lain:

- *Special* audit Reimbursement Biaya Karyawan
- *Review* Cabang Pekanbaru
- *Stock Opname Collateral* Pembiayaan
- *General* Audit dan Operasional Cabang Bandung
- *General* Audit dan Operasional Cabang Denpasar
- *General* Audit dan Operasional Cabang Jakarta 1
- *General* Audit dan Operasional Cabang Medan
- *General* Audit dan Operasional Cabang Palembang

3. PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)

Dalam rangka penerapan APU PPT di Perseroan, maka dilakukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:

a. Penyempurnaan Struktur Kebijakan APU PPT

Sebagai bagian dari penerapan APU PPT, Perseroan menetapkan ketentuan internal sebagai acuan di internal Perseroan dalam menerapkan APU PPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Kebijakan APU PPT yang saat ini berlaku, antara lain sebagai berikut:



b. Penyusunan Klasifikasi Risiko Nasabah

Sesuai dengan SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dimana pemantauan dan pengkinian data Nasabah dilakukan berdasarkan tingkat risiko Nasabah. Pengklasifikasian tingkat risiko Nasabah terdiri dari, yaitu:

- Risiko tinggi;
- Risiko sedang/menengah; dan
- Risiko rendah.

Dari hasil pengklasifikasian tersebut, Fungsi APU & PPT telah menyusun suatu *report atau scoring* sederhana untuk menilai tingkat risiko Nasabah.

c. Pemantauan Pengkinian Data Nasabah

Dalam rangka memenuhi rencana pengkinian data nasabah di tahun 2018 sebagaimana yang telah disampaikan kepada OJK, maka Perseroan telah menyampaikan Realisasi Pengkinian Data Nasabah dengan hasil realisasi pengkinian data nasabah tersebut mencapai 100% (seratus persen) terhadap rencana pengkinian data nasabah.

d. Penyelenggaraan Pelatihan APU PPT

Perseroan menyelenggarakan pelatihan APU PPT sebagai bagian dalam rangkaian dari kegiatan orientasi bagi karyawan baru maupun *refreshment* bagi karyawan lama.

Selama semester Tahun 2018, telah dilakukan 2 (dua) kali pelatihan APU PPT melalui dengan rincian sebagai berikut:

Penyelenggara	Tempat	Tanggal	Peserta	Jumlah
Human Resource & Compliance MNC Leasing	MNC TOWER Lt. 23	7 Maret 2018	Account Officer	15 peserta
Human Resource & Compliance MNC Leasing	MNC TOWER Lt. 23	12 September 2018	Account Officer	11 peserta

Setiap peserta pelatihan mengikuti pre test sebelum pelatihan dan post test setelah pelatihan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menguji kembali pemahaman para peserta pelatihan serta mengevaluasi efektivitas pelatihan yang sudah disampaikan.



e. Pelaporan terkait APU PPT

Fungsi APU PPT memantau dan/atau menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan APU PPT kepada PPATK atau OJK, antara lain:

- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perusahaan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Laporan nasabah baru melalui SIPESAT secara triwulanan yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober
- Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah pada bulan Desember 2018

4. TRANSPARANSI JASA PEMBIAYAAN

Jasa pembiayaan yang disajikan dalam *website* Perseroan, antara lain:

- **Investasi**
Yaitu pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
- **Modal Kerja**
Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
- **Multiguna**
Yaitu pembiayaan untuk persediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

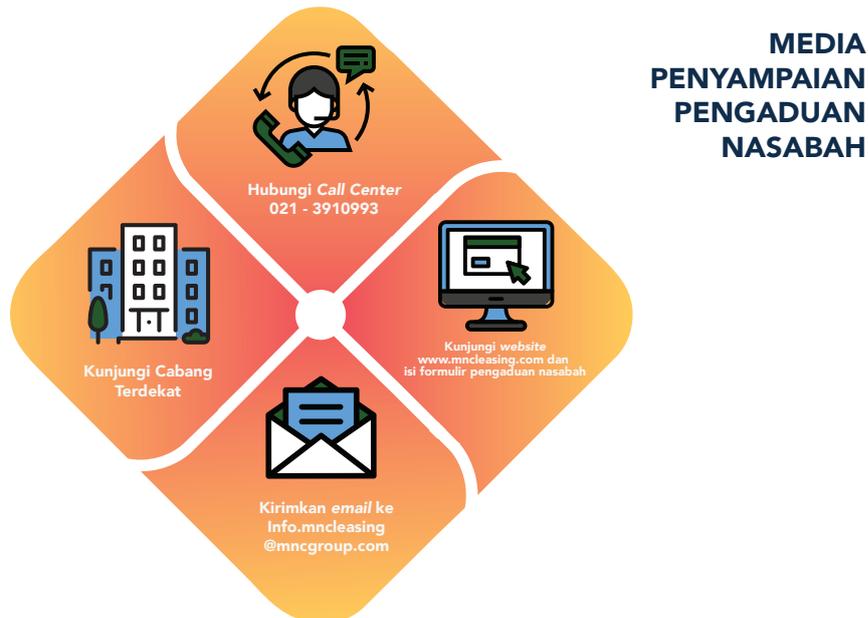
Selain itu, Perseroan juga menyajikan jasa pembiayaan syariah sebagai berikut:

- **Jual Beli (Murabahah)**
Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabah dengan besaran keuntungan bank sudah ditentukan di awal perjanjian atau akad dan keuntungan ini menjadi bagian dari harga atas barang yang dijual.
- **Investasi (IMBT)**
Yaitu pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam membuka atau mendirikan usaha baru, relokasi proyek, ekspansi ataupun penggantian mesin-mesin pabrik.
- **Jasa (Ijarah)**
Yaitu pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

5. TRANSPARANSI TATA CARA PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Sebagai bagian dari penerapan kebijakan perlindungan nasabah, maka Perseroan telah menetapkan unit kerja khusus untuk mengelola pengaduan nasabah dan alur kerja tindak lanjut pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah memegang peranan penting, selain untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan yang diterima dapat dipergunakan untuk evaluasi perbaikan proses pelayanan dan pembiayaan di Perseroan.

Mengingat peranan tersebut, maka Perseroan membuka akses kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan kepada Perseroan, baik secara lisan maupun tertulis.



Solusi penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan dalam waktu 20 hari kerja dan dalam kondisi tertentu penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang hingga paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sesuai POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan diberitahukan secara tertulis kepada konsumen.



**6. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI & DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 50% (LIMA PULUH PERSEN) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM**

Tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki saham 50% (lima puluh persen) atau lebih pada PT MNC Guna Usaha Indonesia maupun perusahaan lain.

7. PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

No	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Paulus Cholot Janala – Direktur Utama	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
2	Yusnandi Liauw – Direktur	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
3	Meita Liliarsari – Direktur	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
4	Wito Mailoa – Komisaris Utama	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
5	Erdie S. Manan – Komisaris Independen	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	

8. PENGUNGKAPAN HAL-HAL PENTING LAINNYA

a. Tenaga Kerja Asing

Selama tahun 2018, PT MNC Guna Usaha Indonesia tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

b. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

c. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Anggota Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Penyimpangan	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian di Internal	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	Nihil	Nihil	Nihil

d. Permasalahan Hukum

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus Perdata	1	Nihil
Total	1	Nihil

e. Etika Bisnis Perseroan

Manajemen Perseroan menyadari bahwa keberlanjutan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh perilaku korporasi atau etika bisnis perusahaan, sehingga etika bisnis perusahaan harus selaras dengan hukum, peraturan, etika, dan sistem manajemen yang efektif. Dalam rangka membangun perilaku korporasi tersebut bagi Komisaris, Direksi, dan segenap karyawan Perseroan, maka diterbitkan kebijakan *Code Of Conduct & Corporate Values*.

Panduan perilaku digali berdasarkan visi, misi, nilai-nilai budaya, komitmen Perusahaan dan standar etika. Seluruh jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia harus mengetahui, memahami, menghayati dan sepakat untuk menerapkan kebijakan *Code Of Conduct & Corporate Values* sebagai landasan moral, sikap, dan etika dalam bertindak dan berperilaku, sehingga daripadanya dapat terjamin pencapaian standar kerja yang maksimal.



Hal-hal yang dicakup dalam kebijakan tersebut, antara lain:

- (1) Integritas dalam berusaha, seluruh jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia diharapkan memiliki integritas sebagai berikut:
 - a) Patuh pada ketentuan dan perundangan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang maupun internal Perseroan.
 - b) Mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan undang-undang persaingan usaha serta undang-undang maupun peraturan terkait.
 - c) Menghindari tindakan melanggar hukum, serta persaingan usaha yang tidak sehat atau perilaku menyimpang dalam upaya mencari laba.
 - d) Mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah. Informasi disimpan serta digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku.
 - e) Melayani setiap pelanggan secara profesional dengan sikap sopan, ramah dan wajar. Seluruh jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan serta mencari alternatif solusi atas masalah pelanggan dengan sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak di dalam Perseroan yang berkaitan dengan pemasaran, penyiapan proposal, administrasi, negosiasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian atas proyek-proyek tertentu dan penulisan laporan harus menyadari pentingnya membuat pernyataan tertulis maupun lisan yang akurat dan klaim yang benar kepada pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain. Pihak yang sengaja menyampaikan pernyataan, laporan, keterangan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang/ pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan dapat dikenakan hukuman administratif, pidana dan perdata.
- (3) Seluruh jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia dilarang untuk membuat pernyataan palsu.
- (4) Setiap jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia dilarang melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan implikasi lanjutannya.
- (5) Perseroan melarang setiap jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia menerima hadiah dalam segala macam bentuk penerimaan oleh pejabat atau karyawan Perseroan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan dengan maksud mempengaruhi keputusan agar menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.
- (6) Perseroan melarang setiap jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia untuk menerima segala bentuk uang, komisi, hadiah, fasilitas, dan apapun yang bernilai manfaat, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau perilaku yang memihak secara tidak sah dari rekanan atau konsumen atau pihak lain. Penegakan disiplin dari segala bentuk penerimaan suap ini adalah pemecatan, dengan tidak mengurangi hak Perseroan untuk memproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (7) Pada prinsipnya entertainment hanya dapat dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan Pekerja tertentu untuk kepentingan Perseroan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Perseroan.
- (8) Perseroan melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurangan adanya penyelewengan.
- (9) Tidak memperkenankan karyawan Perseroan menjadi pengurus partai politik yang berpotensi menyita jam kerja maupun konsentrasi, kecuali dengan persetujuan atasan.



f. Informasi material lain mengenai Perseroan yang terkait dengan pelaksanaan wewenang RUPS dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perseroan.

Selama tahun 2018, tidak ditemukan adanya intervensi pemilik, perselisihan internal, maupun permasalahan yang timbul dari dampak kebijakan remunerasi pada Perseroan.

Perkara Penting Yang Dihadapi

Pada tanggal Laporan Tahunan ini dibuat, Perseroan terlibat dalam suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 575/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. Adapun perkara tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN





Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Perseroan merupakan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (MNC) yang tergabung dalam Group MNC Financial Services yang dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan, menerapkan dan mengembangkan program-program pengembangan bidang sosial dan lingkungan hidup. Perseroan mengupayakan partisipasi dari komunitas di sekitar tempat usaha Perseroan dan pelanggan untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan hidup yang diadakan oleh Perseroan.

Program-program CSR yang dilakukan oleh Perseroan di tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

No	Tanggal Kegiatan	Tempat Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan
1	25 Juli 2018	INews Tower, Jakarta	MNC Group mengadakan aksi donor darah dengan bekerjasama dengan PMI
2	20 Agustus 2018	MNC Tower, Jakarta	MNC Peduli bersama mitra kerja meyalurkan 537 hewan kurban untuk masyarakat di sekitar MNC Tower
3	21 Agustus 2018	MNC Tower, Jakarta	MNC Peduli menyerahkan 1 ekor sapi limousine ke PBNU
4	22 Agustus 2018	Nasional (seluruh daerah operasional MNC Group)	MNC Peduli sumbangkan kurban di seluruh daerah operasional MNC Group
5	12 Desember 2018	MNC Financial Center, Jakarta	MNC Peduli menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala



PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018 PT MNC GUNA USAHA INDONESIA

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT MNC Guna Usaha Indonesia tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2019

DEWAN KOMISARIS

Wito Mailoa

Komisaris Utama

Erdie Suriaherdadi Manan

Komisaris Independen

DIREKSI

Paulus Cholot Janala

Direktur Utama

Yusnandi Liauw

Direktur

Meita Liliarsari

Direktur

 LAPORAN
TAHUNAN 2018



PT. MNC Guna Usaha Indonesia

MNC Tower Lantai 23, Jl. Kebon
Sirih No. 17-19, Jakarta 10340
(021) 3910 993
(021) 3911 093

www.mncleasing.com